

Tesis
Representasi Perempuan dalam Tata Kelola
Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur



Disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai
derajat magister dalam bidang Tata Kelola Seni

Ayunita Kurnia Ningsih

NIM 2120210420

PROGRAM STUDI TATA KELOLA SENI PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

Sebuah daya dan upaya untuk perempuan pekerja seni
yang setara dalam berkarya



TESIS
MAGISTER TATA KELOLA SENI

**REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM TATA KELOLA
DEWAN KESENIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

Diajukan oleh
Ayunita Kurnia Ningsih
NIM 2120210420

Telah dipertahankan pada tanggal **7 Juni 2023**
di depan Dewan Penguji yang terdiri dari

Pembimbing Utama,



Dr. Citra Aryandari, S.Sn., MA.

Penguji Ahli,



Dr. Destha Titi Raharjana, S.Sos., M.Si

Ketua Tim Penilai,



Dr. Suwarno Wisetrotomo, M. Hum.

Telah diperbaiki dan disetujui untuk diterima
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Seni

Yogyakarta, ... 04 JUL 2023

Direktur Program Pascasarjana
Institut Seni Indonesia Yogyakarta,



Dr. Fortunata Tyasrinestu, M.Si.
NIP 19721023 200212 2 001

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas perpanjangan tangan-Nya yang telah menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan tesis dari pengalaman empiris yang berjudul “Representasi Perempuan dalam Tata Kelola Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur” untuk memperoleh gelar Magister Seni pada bidang Tata Kelola Seni di Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Karya ini dapat tercipta atas dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Citra Aryandari, S. Sn., MA. selaku Pembimbing yang sangat ringan tangan, pemberi waktu yang tak pernah jenuh, pemberi masukan yang tak kenal lelah, serta pemberi semangat untuk menciptakan karya ini.
2. Dr. Koes Yuliadi, M. Hum. selaku Ketua Prodi Tata Kelola Seni Program Magister yang telah membimbing dan memberikan pembelajaran tentang pengorganisasian suatu karya seni hingga semester akhir.
3. Agus Salim, Emmy Palenewan, Toto, Nanik Sriyati sebagai orang tua yang selalu mendoakan penulis dalam sujudnya. Kakak dan adik serta saudara/i tercinta yang selalu menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan kelompok yang tak pernah jauh dari hati.
4. Seluruh dosen Pascasarjana ISI Yogyakarta yang telah membuka wawasan penulis dalam memandang dan memahami dunia seni lebih dalam lagi.
5. Seluruh staf dan karyawan/i Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang dengan tulus membantu berbagai hal dari awal hingga sampai proses kelulusan penulis.
6. Teman-teman seperjuangan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta angkatan 2021 yang saling menyemangati.

7. Teman-teman terdekat saya di kelas Tata Kelola Seni angkatan 2021, Ni Wayan Ria, Dyan Lidyana, Leny Suryani, Prasetyo Adhitama. Terima kasih untuk energi dan cerita-cerita suka dukanya selama ini. Kita adalah orang sukses yang akan bertemu di kemudian hari dengan cerita-cerita romantisme selanjutnya.
8. Sahabat dan orang-orang terkasih yang selalu siap menjadi tempat penulis berkeluh kesah dalam menuliskan karya ini, Nadira Reza Chairani, Rizka Amanditya, dan Fadliyati Ulya. Kepada Nanda Setyawan atas kehadirannya yang tidak hanya dapat menjadi pendengar atas kemauan penulis tetapi menjadi rekan diskusi serta berproses dalam penulisan ini. Kalian luar biasa.
9. Kepada Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendukung penulis secara penuh untuk belajar dan berkarya di Pascasarjana ISI Yogyakarta.
10. Terima kasih kepada diri penulis yang selalu kuat, pantang menyerah untuk melawan duka, tangis, amarah, kecewa, dan tak lupa untuk tertawa, tersenyum, dan menyayangi diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis sampaikan permohonan maaf dan meminta kritik serta saran yang diharapkan menjadi pengetahuan ke depannya.

Yogyakarta, 07 Juli 2023
Penulis

Ayunita Kurnia Ningsih
2120210420

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa karya seni dan pertanggungjawaban tertulis ini merupakan hasil karya sendiri, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi manapun dan pernah dipublikasikan.

Saya bertanggung jawab atas keaslian karya saya ini, dan bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini.

Yogyakarta, 07 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,

Ayunita Kurnia Ningsih



PENGALAMAN EMPIRIS SEBAGAI PEREMPUAN BERDAYA

“REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM TATA KELOLA DEWAN KESENIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR”

Pertanggungjawaban Tertulis
Program Studi Tata Kelola Seni Program Magister
Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2023

Oleh **Ayunita Kurnia Ningsih**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan **Representasi Perempuan dalam Tata Kelola Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur**. Kesenian memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari budaya lokal. Namun, perempuan sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan di bidang seni dan budaya. Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kalimantan Timur dan negara secara keseluruhan luput pada nilai-nilai tradisional yang terkait dengan peran gender dalam ruang ekspresi seni. Nilai-nilai tradisional sering kali mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran gender dalam seni, yang dapat menghambat partisipasi dan pengakuan dalam ekosistem seni yang adil dan inklusif.

Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang nilai-nilai inklusif yang terkandung dalam praktik seni pada zaman Kerajaan Kutai Kertanegara. Temuan ini memiliki implikasi penting dalam konteks seni dan budaya saat ini, yang menghadapi tantangan dalam menciptakan ruang yang inklusif, menghormati keberagaman, dan memastikan persamaan hak bagi semua individu. Penelitian ini menggunakan metode etnografi *explanatory* dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi partisipatif sebagai metode pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari anggota Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur. Data yang terkumpul dideskripsikan menggunakan teknik konten dengan teori performatif gender dari Judith Butler untuk mengidentifikasi bagaimana representasi perempuan dalam tata kelola Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang peran teori performatif gender dalam mendeskripsikan representasi perempuan dalam tata kelola kepemimpinan Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan landasan bagi perubahan sosial yang inklusif dan mengarah pada kesetaraan gender yang lebih baik dalam konteks seni dan budaya.

Kata kunci: tata kelola, pemimpin perempuan, seni budaya, dewan kesenian, Kalimantan timur

EMPIRICAL EXPERIENCE AS A POWERFUL WOMAN
" WOMEN'S REPRESENTATION IN THE GOVERNANCE OF
REGIONAL ARTS COUNCIL IN EAST KALIMANTAN"

Written Liability
Arts Management Master Program
Postgraduate Indonesian Institute of the Art Yogyakarta, 2023

by **Ayunita Kurnia Ningsih**

ABSTRACT

*This study aims to describe the **Women's Representative in the Governance of Regional Arts Council in East Kalimantan**. Art has an important role in people's lives and is an integral part of local culture. However, women often do not get the same opportunity to be involved in decision-making and leadership in the arts and culture. The East Kalimantan Regional Arts Council (DKD) and the country as a whole miss traditional values related to gender roles in spaces of artistic expression. Traditional values often influence societal views of gender roles in art, which can hinder participation and recognition in a fair and inclusive arts ecosystem.*

This research also provides insight into the inclusive values contained in art practices during the Kutai Kertanegara Kingdom era. These findings have important implications in today's arts and culture context, which faces challenges in creating spaces that are inclusive, respect diversity, and ensure equal rights for all individuals. This study used an explanatory ethnographic method with a qualitative approach involving interviews and participatory observation as a data collection method. The informants in this study consisted of members of the East Kalimantan Regional Arts Council. The collected data is described using content techniques with the performative theory of gender from Judith Butler to identify how women are represented in the governance of the East Kalimantan Regional Arts Council.

This research is expected to provide theoretical and practical contributions in a deeper understanding of the role of performative gender theory in describing the representation of women in the governance of the leadership of the East Kalimantan Regional Arts Council. Thus, this research can provide a foundation for social change that is inclusive and leads to better gender equality in the context of art and culture.

Keywords: governance, women leaders, arts and culture, arts council, East Kalimantan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
APRESIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Sumber	9
B. Kajian Teori	11
BAB III	14
METODE PENELITIAN	14
A. Jenis Penelitian	14
B. Lokasi dan Subjek Penelitian	14
C. Waktu Penelitian	15
D. Teknik Pengumpulan Data	15
E. Teknik Analisis Data	16
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	18
BAB IV	20
HASIL DAN PEMBAHASAN	20
A. Kesenian di Kalimantan Timur	20
B. Tata Kelola Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur	31
C. Konstruksi Gender dan Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur sebagai Representasi Negara	45
D. Gagalnya Memahami Makna Gender dalam Berkesenian di Kalimantan Timur	52

BAB IV	56
KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Luputnya Dewan Kesenian Daerah Kaltim dalam Melegitimasi Peran Perempuan dalam Tata Kelola Seni	56
B. Hal-hal yang dapat Dijadikan Pertimbangan untuk Penelitian Selanjutnya .	57
DAFTAR PUSTAKA	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni dan budaya selalu menjadi ajang yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat, baik itu penikmat maupun pelaku itu sendiri. Sampai dengan hari ini banyak sekali perhelatan seni dan budaya yang dibuat dengan ciri khas masing-masing daerah, seperti halnya di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Daerah tersebut memiliki ragam jenis kesenian mulai dari tari, rupa, musik, hingga sastra. Meski demikian, persoalan seni dan budaya juga tidak lepas dari problematika ketimpangan gender. Hal tersebut menjadi masalah yang perlu diperhatikan berkaitan dengan keterwakilan dan akses, stereotip dan peran gender, penghargaan dan pengakuan, serta isu keamanan dan perlindungan. Aspek-aspek tersebut menjadi masalah yang berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan bagi seniman, terutama seniman perempuan.

Stereotip dan ekspektasi gender yang kuat tentang perempuan dapat mempengaruhi pengakuan serta apresiasi terhadap kontribusi seniman perempuan. Seperti halnya ekspektasi terhadap perempuan untuk mengutamakan peran tradisional sebagai ibu, istri, anggota keluarga menjadikan perempuan sulit untuk berpartisipasi aktif secara penuh waktu dalam dunia seni. Stereotipe mengasumsikan bahwa perempuan tidak lebih berbakat dari laki-laki dalam menciptakan karya seni yang inovatif atau mendapatkan prestasi yang tinggi. Hal tersebut dapat membatasi kebebasan kreativitas dan menghambat perempuan untuk mengakses sumber daya serta kesempatan dalam dunia seni, seperti pendidikan formal, dukungan finansial, jaringan profesional, dan infrastruktur. Sehingga dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan karir seniman perempuan.

Perempuan seniman tidak hanya sulit dalam mengembangkan karirnya tetapi juga rentan untuk mengalami diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan gender dalam dunia seni. Hal tersebut yang menjadikan sejumlah perempuan anggota Koalisi Seni bergerak mengupayakan kesetaraan bagi perempuan melalui musik, sastra, dan kolektif seni. Tiga di antaranya adalah Kartika Jahja (Jakarta), Lily

Yulianti Farid (Makassar), dan Rahmadiyah Tria Gayathri (Palu). Menurut Tika di dalam artikel yang ditulis oleh Koalisi Seni dengan judul Tiga Perempuan untuk Ekosistem Seni yang Setara bahwa seksisme, pelecehan, kekerasan, hingga standar kecantikan yang tak realistis masih langgeng dalam industri musik arus utama. Tika menjelaskan pengalamannya saat menjadi juri di salah satu kompetisi musik. Pelecehan verbal dan *male gaze* atau pandangan seseorang secara visual sebagai objek pada kontestan perempuan tak terhindarkan.¹

Situasi-situasi yang rentan untuk perempuan seniman dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak inklusif, serta dapat menghalangi kemajuan dan pencapaian perempuan dalam bidang seni. Karya seni perempuan sering kali diabaikan dan tidak mendapatkan pengakuan yang sebanding dengan karya seni yang dibuat oleh laki-laki. Pameran seni, penghargaan, dan kesempatan promosi sering kali didominasi oleh karya seni laki-laki, sehingga sulit bagi perempuan untuk mendapatkan eksposur yang sama. Dari persoalan tersebut, akan terjadi kurangnya representasi terhadap karya seni perempuan. Sehingga, dapat menyebabkan kurangnya perhatian dan apresiasi terhadap kontribusi seniman perempuan itu sendiri. Sehubungan dengan itu, hal tersebut juga dapat mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri perempuan untuk terus berinovasi dan berkarya.

Pada konteks Kalimantan Timur, kegigihan para pegiat seni budaya lokal berhasil menguatkan Gubernur Kaltim, H Isran Noor untuk mengadakan perhelatan Anugerah Kebudayaan Kaltim 2022, *Education* dan *Culture Award*. Kegiatan yang diadakan pada November 2022 lalu tersebut memperkuat bahwa ada ketimpangan gender dalam kesenian di Kaltim yang perlu diperhatikan. Terlihat bahwa penerima Anugerah Kebudayaan tersebut adalah laki-laki dan tidak ada penghargaan yang diberikan kepada perempuan, di antaranya Sabri (Pelestari Permainan Rakyat), Aji Achmad Dicky Belly (Pelestari Adat Istiadat), Drs. Herman Ashari, M.Psi (Sastrawan Daerah), Muhammad Hatta (Pelopor dan Kreator Tari Daerah), dan empat orang laki-laki lainnya. Sembilan peraih Anugerah Kebudayaan tersebut dianggap layak mendapatkan penghargaan berdasarkan penelitian dan verifikasi portofolio dari puluhan nominator, hingga mengunjungi rumah para nominator di

¹ Dian Putri, "Tiga Perempuan untuk Ekosistem Seni yang Setara," Koalisi Seni, Juni 15, 2023, <https://koalisiseni.or.id/tiga-perempuan-untuk-ekosistem-seni-yang-setara/>

Kabupaten/Kota Se-Kaltim. Para dewan juri juga mewawancari tentang rekam jejak dan aktivitas para nominator di bidang seni dan budaya.²

Hal di atas membuktikan bahwa perhatian Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kaltim sebagai lembaga seni provinsi mewakili negara, terhadap pelaku seni perempuan seperti Ratih Astria Dewi (Perupa), Agustin Panca Wardany (Pelukis), atau Desy Soleha (Pelukis Batik) belum kuat. Sebagai opini dari pernyataan tersebut, pendapat dari Citra Sasmita (2015) seorang perupa dari Bali harus dimunculkan lagi bahwa, “tak dapat dipungkiri bahwa mitos perempuan sebagai subjek seni memang kalah besar dibandingkan perempuan sebagai objek seni.”³ Pun jika para seniwati berani untuk membuat pameran seni yang berbalut isu sosial, seperti kekerasan seksual yang menjadi pengalaman personal, sering kali menjadi permasalahan oleh berbagai pihak.

Kolektif Betina yang merupakan kolektif perempuan-perempuan kreatif lintas kota saat menggelar acara seni bertemakan Lady Fast, sebuah pagelaran seni berupa pameran seni dan konser untuk membicarakan tentang problematikan perempuan di ranah seni. Acara tersebut diadakan di ruang seni Komunitas *Survive Garage* pada 2 April 2016 di Yogyakarta. Penyelenggara dipaksa untuk menghentikan kegiatan tersebut oleh polisi dan organisasi massa karena dianggap tidak memiliki izin serta menyebabkan gangguan publik. Maka demikian penghormatan terhadap perempuan memang identik dengan problematika gender. Namun demikian, organisasi massa memperlakukan perhelatan tersebut karena dianggap menyebarkan ideologi komunis dan mempromosikan kehidupan homoseksual. (Gumay et al., 2020).

Terlebih lagi, keberadaan perempuan sebagai pegiat seni dan budaya tidak luput pada perihal administratif yang jauh dari ranah pengambilan keputusan. Hal yang menjadi dasar dalam pemberian posisi perempuan dan laki-laki adalah konstruksi sosial. Sehingga peran perempuan tidak lepas dari hal-hal teknis administrasi dibandingkan dengan laki-laki yang menyusun strategi dan menjadi pemimpin. Sehingga perempuan diposisikan pada ranah reproduktif dalam urusan

² Hamdani, “Malam Ini 9 Budayawan dan Seniman Kaltim Terima Anugerah Kebudayaan” Niaga.Asia, Juni 15, 2023, <https://www.niaga.asia/malam-ini-9-budayawan-dan-seniman-kaltim-terima-anugerah-kebudayaan/>

³ Citra Sasmita, “Metanarasi Perempuan dalam Seni Rupa” Jurnal Perempuan, Juni 15, 2023. <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/metanarasi-perempuan-dalam-seni-rupa>

lembaga sehari-hari. Dalam buku *The Second Sex* oleh Simone de Beauvoir (1949) menyatakan bahwa secara fundamental, laki-laki melakukan operasi atau tidak memberikan kebebasan terhadap perempuan dengan mengategorikannya di berbagai level, dianggap sebagai yang lain, dan secara eksklusif berbeda dengan laki-laki. Subjek adalah laki-laki dan perempuan dianggap sebagai objek, perempuan merupakan makhluk yang mutlak atau tidak dapat diubah sedangkan laki-laki ialah seseorang yang penting. (De Beauvoir et al., 1953).

Temuan Koalisi Seni (2021) menyatakan bahwa posisi perempuan menjadi pemimpin di Dewan Kesenian tidak lebih dari 10 atau hanya 4, sama dengan 6,55% di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Area tersebut juga tidak mencakup keseluruhan daerah di Indonesia, melainkan pada Dewan Kesenian Tanah Papua Kab. Jayapura, Dewan Kesenian Kab. Pesisir Barat, Dewan Kesenian Kota Lubuklinggau, dan Dewan Kesenian Provinsi Sulawesi Utara. Terlebih lagi, adapun peran pemimpin perempuan dalam Dewan Kesenian Daerah tidak menunjukkan latar belakang sebagai pelaku seni atau pengalaman kerja dalam lingkup kebijakan seni dan budaya, melainkan istri dari kepala daerah setempat yang berpengalaman pada isu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.⁴

Di dalam bidang seni rupa, perempuan masih berada di posisi subordinasi laki-laki. Perempuan dianggap sebagai sumber keindahan dan objek seni. Seperti halnya tradisi melukis model telanjang yang diperkenalkan oleh Le Mayeur seorang perupa dari Barat. Le Mayeur melukis tubuh Ni Pollok seorang model asal Bali yang kemudian dijadikan istri dan tidak diizinkan hamil demi menjaga keindahan tubuh. Hal tersebut juga dilakukan oleh Antonio Blanco terhadap Ni Ronji. Perempuan selalu dianggap sebagai sumber keindahan, dieksplorasi, dan dieksplotasi atas nama seni karena pandangan patriarki yang menganggap perempuan sebagai elemen alam dan laki-laki sebagai elemen budaya. Sebagai elemen budaya, laki-laki menobatkan dirinya sebagai penciptan, pembentuk budaya, dogma, norma, aturan, dan sebagainya.⁵

⁴ Safira, "Jejak Perempuan Pemimpin dalam Dewan Kesenian" Koalisi Seni, 15 Juni, 2023, <https://koalisiseni.or.id/jejak-perempuan/>

⁵ Wayan Sunarta, "Memperjuangkan Kesetaraan Gender melalui Kesenian" Bale Bengong, 15 Juni, 2023, <https://balebengong.id/memperjuangkan-kesetaraan-gender-melalui-kesenian/>

Subordinasi perempuan terjadi karena adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Hal itu muncul dari pandangan stereotipe tentang perempuan. Perempuan selalu diberi label makhluk irasional, emosional, lemah, dan sebutan lainnya yang menyebabkan posisi perempuan selalu menjadi nomor dua setelah laki-laki. Hal ini juga bagian dari upaya pembentukan laki-laki yang dianggap sebagai pencari nafkah. Meski hal tersebut merupakan contoh dalam skala kecil di bidang seni rupa, di samping banyaknya masalah kesetaraan yang belum adil bagi perempuan di bidang seni lainnya. Kongres Kebudayaan Indonesia, misalnya, yang diadakan pada Desember 2018 yang seharusnya menjadi ruang dialog, ekspresi, dan saling mengenal keanekaragaman budaya Indonesia pun, belum banyak melibatkan perempuan sebagai pembicara atau mempertimbangkan perspektif feminis (Paramaditha, 2019).

Hal krusial lainnya yang menjadikan perempuan belum hadir secara utuh dalam ranah seni dan budaya, yaitu tidak adanya kesadaran dalam sebuah kelembagaan seni dan budaya atas peran gender yang setara. Hal ini berimplikasi pada minimnya ruang untuk karya seni perempuan yang dapat dipamerkan. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa posisi perempuan belum sejajar dengan laki-laki dalam tataran manajemen, dalam hal ini kelembagaan DKD Kalimantan Timur. Perkara ini ditemukan karena lingkungan sosial yang membentuk perempuan untuk tidak memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki, lingkungan keluarga yang merancang perempuan hanya untuk menjadi seorang istri dan ibu dengan urusan domestik, dan pola pikir yang menanamkan bahwa perempuan tidak memiliki ruang untuk berkarya. Persoalan-persoalan itu menjadi tanda bagi perempuan untuk tidak mengenali potensi dirinya.

Di Kalimantan Timur, Dewan Kesenian Daerah menjadi wadah utama dari pusat aktivitas kebudayaan. Sehingga berbagai persoalan terkait kesenian dan kebudayaan perlu diperhatikan, terutama pada bagian manajemen kesetaraan gender pada sumber daya manusianya. Namun nampaknya, kesadaran akan kesetaraan gender di DKD Kalimantan Timur belum menjadi perhatian serius. Hal ini terlihat dari representasi kepemimpinan perempuan belum tampak dari tahun terbentuknya DKD itu sendiri yaitu 1996-2001 hingga sekarang 2021-2026. DKD dari masa ke masa menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dari Ketua Umum hingga Sekretaris Umum. Di sini terlihat bahwa perempuan masih ditempatkan

sebagai pelaksana aktivitas reproduktif, seperti perawatan rumah tangga dalam kelembagaan dibanding dengan laki-laki dalam sebuah perancangan. Padahal, ihwal dari cita-cita Dewan Kesenian terbentuk pada tahun 1993 ialah menjadikan pelaku seni dan budaya dalam posisi yang sama.

Dari pernyataan di atas maka minat timbul akan sadar gender karena ada rangsangan dari luar seperti lingkungan sekitar dan alam. Adanya besar dan kecil minat dari seseorang akan paham tentang gender tergantung pada hal-hal seperti ajaran atau konstruksi di dalam keluarga, kesempatan, hingga dorongan yang keluar dari diri sendiri. Seperti halnya ajaran terhadap peran laki-laki untuk tampil berani dan ekspresif, sedangkan perempuan yang mengharuskan di dalam rumah dan bersentuhan dengan aspek-aspek yang jauh dari kesenian. Sehingga tidak jarang mengharuskan laki-laki untuk dapat berkarya di luar rumah yang dapat berpotensi munculnya eksistensi terhadap kelompok ini. Terbentuknya karir laki-laki telah diajarkan dalam keluarga yang terpapar dengan konstruksi gender dari asuhan kelembagaan, dalam hal ini adalah pemerintah.

Kenyataan-kenyataan tersebut merupakan bukti terjadinya ketimpangan gender di dalam kehidupan sosial yang juga tidak terlepas di dunia kesenian, khususnya dalam tingkatan manajemen. Padahal, interaksi langsung antara perempuan dan laki-laki pekerja seni juga dapat menjadi acuan untuk memperbaiki ketimpangan gender dalam bidang seni serta budaya. Sehingga, untuk menciptakan inklusi sosial yang sadar akan gender diperlukan rekonstruksi pemahaman atas kesetaraan gender di dalam kebijakan seni dan budaya, serta pendistribusian yang merata kepada masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tata kelola seni di DKD Kalimantan Timur perlu restrukturisasi kebijakan yang berperspektif gender. Hal itu berkaitan dengan pedoman dasar bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk berkesenian secara bebas, apapun gendernya seperti yang dikemukakan Koalisi Seni (2021). Adanya distribusi pengetahuan tentang sadar akan perspektif gender pada pegiat seni, budaya, dan pembuat kebijakan di Indonesia menjadi interaksi awal untuk menjunjung sila ke-5 pada Pancasila. Pernyataan tersebut yang menjadikan

penelitian ini penting untuk dilakukan agar masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat menyetarakan perempuan dalam tata kelola. Sehingga dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian gender dalam tata kelola Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur?
2. Bagaimana kebijakan yang inklusif dapat menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki dalam tata kelola Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

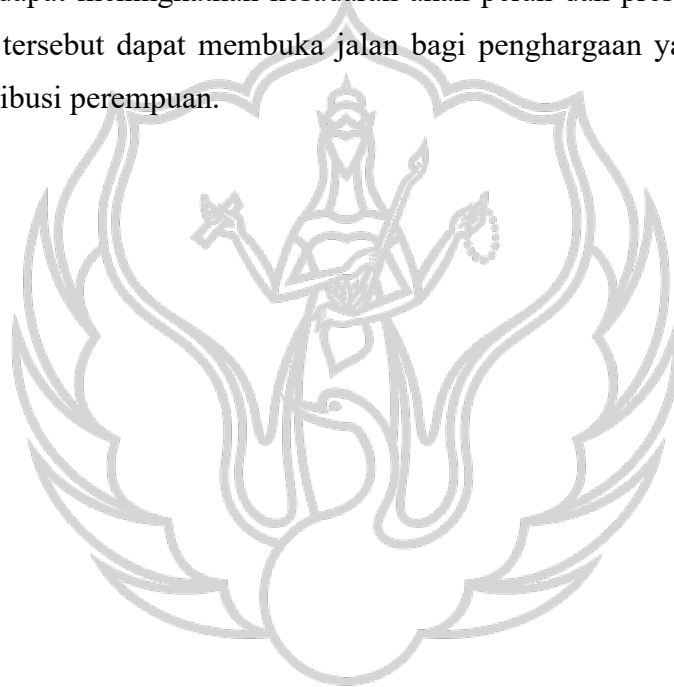
1. Mendeskripsikan tingkat dan bentuk representasi perempuan yang diwakilkan dalam struktur kepengurusan DKD Kalimantan Timur. Penelitian ini dapat melihat jumlah perempuan yang terlibat dalam posisi kepengurusan, komite, atau badan pengambil keputusan di dalam dewan. Selain itu, penelitian ini juga dapat melihat peran dan tanggung jawab yang diemban oleh perempuan dalam tata kelola kesenian.
2. Mendorong perubahan sosial dan kesadaran terhadap pentingnya representasi perempuan dalam tata kelola DKD Kalimantan Timur. Dengan mempublikasikan hasil penelitian dan memperluas pemahaman tentang isu-isu gender dalam konteks kesenian, tujuan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya inklusivitas, kesetaraan gender, dan partisipasi perempuan dalam sektor seni.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka manfaat penelitian ini hendak membantu mempromosikan kesetaraan gender dalam tata kelola Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kalimantan Timur. Adanya analisa representasi perempuan dalam struktur kepengurusan dan proses pengambilan keputusan, penelitian ini dapat mengidentifikasi ketimpangan yang mungkin ada. Sehubungan dengan itu, keterlibatan perempuan dalam tata kelola DKD Kalimantan Timur dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengambilan keputusan. Terlebih lagi,

penelitian ini dapat menjadi instrument penting dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam konteks kesenian.

Penelitian ini dapat membantu mengembangkan strategi dan kebijakan yang inklusif, serta menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam sektor seni. Apabila representasi perempuan dalam tata kelola DKD Kalimantan Timur diperhatikan, maka akan terciptanya lingkungan yang inklusif dan beragam. Sehingga, ketika menghadapi tantangan dapat dimitigasi oleh perempuan dan laki-laki secara kolaboratif dalam sektor seni. Dengan memberikan analisis yang komprehensif tentang representasi perempuan dalam tata kelola DKD Kalimantan Timur, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan peran dan prestasi perempuan dan seni. Hal tersebut dapat membuka jalan bagi penghargaan yang lebih besar terhadap kontribusi perempuan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Sumber

Berikut beberapa kajian sumber yang berkaitan dengan penelitian ini:

Penelitian Putraningsih (2006) dengan judul *Pertunjukan Tari: Sebuah Kajian Perspektif Gender* telah memberikan banyak informasi tentang norma patriarki yang mengkerdikan peran perempuan di dalam dunia seni, terutama seni pertunjukan. Perempuan tidak mudah mendapatkan ruang untuk mengekspresikan dirinya dalam bidang seni tari. Terdapat 2-3 penari yang berasal dari Yogyakarta dan Surakarta yang mengeluarkan karya seni tarinya untuk menyuarakan kehidupan kelompok perempuan di Indonesia dan era kolonial. (Putraningsih, 2006). Karya-karya tersebut memiliki nilai untuk didiskusikan dalam sudut pandang gender. Pandangan tersebut akan memberikan pemahaman baru tentang peran perempuan pelaku seni diatur oleh alam, gender, masyarakat sosial, dan kultur.

Dalam studi *Konsep Pembelajaran Seni Budaya Berperspektif Gender*, Sofyan (2012) menuliskan bahwa pembelajaran konstruksi gender belum serius dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Hal tersebut sehubungan dengan pengajar belum memahami konsep budaya berperspektif gender. Ketidaktahuan pengajar akan definisi dan makna kesetaraan gender dalam seni serta budaya menjadikan pengetahuan yang disampaikan bernilai bias gender. (Sofyan, 2012). Maka dengan begitu rancangan belajar yang diciptakan oleh pengajar berdasarkan penyesuaian kondisi, minat, kemampuan, dan gender dari siswa. Adanya kebijakan dan pendidikan dini yang berperspektif gender perlu dibentuk agar makna gender dapat direkonstruksi.

Pada dunia seni rupa, Winarno (2007) dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Persoalan Kesetaraan Gender dalam Karya Seni Rupa Kontemporer Indonesia* mengemukakan bahwa karya seni yang dibuat oleh perempuan sering kali bertemakan tentang gender, khususnya seni rupa yang dihasilkan oleh perempuan perupa di Indonesia. Meski karya tersebut tidak pasti menggambarkan

pengalaman pelaku seni itu sendiri. Namun menyuarakan kesetaraan gender di sebuah karya seni dapat membuka wawasan masyarakat atas pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan. Membuat karya yang menggaungkan persoalan gender pada seni rupa di Indonesia menjadi linier dengan seni rupa kontemporer secara global (Winarno, 2007). Di samping itu, keberanian tersebut menjadi terapi pribadi karena telah membantu untuk menyalurkan beban mental yang dirasakan oleh perempuan.

Sedangkan menurut Astari (2020) dalam penelitiannya *Rejang Renteng Bentuk Kesetaraan Gender Dalam Ruang Seni Sakral di Kota Denpasar* menginformasikan bahwa ada eksistensi perempuan dalam ruang-ruang seni yang berhubungan dengan agama di Bali. Umum diketahui bahwa perempuan ditempatkan pada posisi yang minor bahkan jika berada di dalam ruang sakral atau agama. Namun seni tari Rejang Renteng membuktikan bahwa kesetaraan gender dapat diterapkan dalam ruang seni. Rejang Renteng dengan gerakan klasik dan sederhana mampu mengambil perhatian penontonnya karena perempuan diberikan ruang yang sama dengan laki-laki (Luh et al., 2020). Hal ini selaras dengan konsep sastra bahwa semua makhluk memiliki tempat yang sama di hadapan pencipta.

Pustaka di atas menjadi penting diambil sebagai acuan dalam penelitian ini untuk menjadi pedoman bagi penulis untuk mendeskripsikan tentang Representasi Perempuan dalam Tata Kelola DKD Kalimantan Timur. Sumber kajian ini dapat membantu penulis dalam mendeskripsikan subjek yang diteliti berkaitan dengan representasi perempuan.

B. Kajian Teori

1. Seni dan Gender

Seni dan gender merupakan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami hubungan antara seni, gender, dan identitas gender. Pada implementasinya, teori ini melibatkan analisis tentang bagaimana gender dan identitas gender mempengaruhi pemahaman, pengalaman, dan interpretasi terhadap pengalaman mengelola seni serta posisi perempuan dan laki-laki dalam bidang seni. Seni dapat memainkan peran penting dalam membentuk, merefleksikan, dan mempengaruhi konstruksi gender serta pemahaman tentang peran gender dalam masyarakat.

Gender memiliki arti sebagai perilaku yang dipelajari dalam masyarakat berdasarkan kegiatan, tugas-tugas, dan tanggung jawab yang dapat diterima oleh perempuan maupun laki-laki. Di dalam buku *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* oleh Judith Butler (1990) mengemukakan bahwa tidak ada gender yang asli melainkan dapat ditampilkan secara berulang dan bergantian, atau disebut dengan performativitas gender. (Butler, 1999). Gender bukanlah esensi yang mendasari identitas seseorang, melainkan sesuatu performativitas atau pertunjukan yang dilakukan dalam masyarakat. Butler berargumen bahwa gender tidaklah dihasilkan oleh identitas individu yang melekat pada tubuh manusia, melainkan oleh tindakan dan interaksi sosial yang memperkuat pandangan-pandangan dan stereotip-stereotip tertentu tentang apa yang dianggap sebagai laki-laki dan perempuan.

Performativitas gender bukanlah sesuatu yang sederhana atau statis, melainkan proses yang terus-menerus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertunjukan gender terjadi melalui pilihan kata, gerakan tubuh, dan perilaku lainnya yang mengikuti atau melanggar norma-norma gender yang ada dalam masyarakat. Konsep performativitas gender oleh Butler menyoroti bahwa gender bukanlah sesuatu yang alami atau tak terbantahkan, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dapat berubah dan ditantang. Butler juga berpendapat bahwa dengan memahami performativitas gender dan bagaimana hal itu terbentuk, masyarakat dapat membuka ruang untuk melanggar batasan-batasan gender yang mengikat dan

menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru untuk identitas gender yang lebih inklusif dan bebas.

Performativitas gender juga memiliki peran yang signifikan dalam dunia seni. Banyak seniman yang menggunakan medium artistik untuk menggali dan mempertanyakan konstruksi gender serta norma-norma yang terkait dengannya. Seniman-seniman tersebut sering kali menggunakan seni sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan politik, mengganggu pemahaman tradisional tentang gender, dan menciptakan ruang bagi identitas yang tidak terikat oleh stereotip gender yang kaku. Selain itu, gerakan seni feminis juga telah memberikan panggung bagi performativitas gender dalam seni. Seniman-seniman feminis seperti Judy Chicago, Yoko Ono, dan Guerrilla Girls telah menggunakan seni untuk mengeksplorasi, memperjuangkan, dan merayakan pengalaman perempuan, serta untuk mengkritik norma-norma gender yang patriarkal.

Teori performativitas gender menurut Butler juga mencakup penggunaan tindakan atau gerakan tubuh dalam karya seni. Seniman dapat menggunakan gerakan tubuh untuk menggugah penonton tentang norma-norma gender terkait dengan tubuh dan ekspresi diri. Gerakan tubuh dapat melibatkan tarian, gestur, atau bahkan tindakan yang dianggap tabu dalam konteks gender. Seniman yang menganut perspektif Butler, seperti yang disebutkan di atas, sering kali menggunakan performativitas gender dalam karya-karyanya untuk meragukan batasan-batasan gender yang ada. Seniman-seniman tersebut menggunakan identitas gender mereka sendiri atau mengadopsi peran-peran gender yang tidak konvensional dalam pertunjukan. Dalam melakukannya, seniman tersebut menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru untuk identitas gender dan menggugah penonton untuk mempertanyakan pandangan tentang gender.

Di dalam dunia seni dan budaya di Indonesia, ketimpangan gender masih menjadi isu krusial. Hal tersebut berakar pada tidak adanya manajemen kebijakan pemerintah yang mengarusutamakan kesetaraan gender untuk mencapai inklusi sosial. Gagasan mengenai kebijakan berperspektif gender di Indonesia pertama kali diwacanakan oleh Koalisi Seni. Urgensi tersebut sudah sampai level yang tinggi dalam ranah seni dan budaya.⁶ Meski demikian terdapat program Fasilitas Bidang Kebudayaan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian

⁶ Koalisi Seni. 2021. Advokasi Keadilan Gender dalam Seni. Jakarta koalisiseni.or.id

Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menetapkan kebijakan baru pada 2021, yakni terhadap lembaga dan program seni yang melibatkan perempuan, baik penggagas dan pekerja, sebagai prioritas utama.⁷ Sehingga, hal tersebut perlu diimplementasikan pada setiap kelembagaan seni dan budaya, khususnya pada Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur.

2. Kritik Feminis dalam Seni

Kritik feminis dalam seni melibatkan analisis terhadap kesenjangan gender dalam seni dan upaya untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Kritik feminis dalam seni mengamati sejarah seni yang sering kali didominasi oleh karya laki-laki, serta mengadvokasi pengakuan dan apresiasi terhadap seniman perempuan. Kritik feminis juga melibatkan penelitian tentang peran perempuan dalam seni dan pertanyaan tentang objektifikasi atau pembebasan gaya kepemimpinan.

Gaya kepemimpinan feminis memiliki agenda untuk membangun penilaian diri perempuan dalam memperkuat cara memimpin. Agenda tersebut juga untuk membekali perempuan dengan kemampuannya, sumber dayanya, dan aksesnya dalam mengambil keputusan sehingga dapat membuat perubahan pada organisasinya. Perempuan pemimpin yang memiliki perspektif feminis akan mengidentifikasi ketidakadilan dan penindasan untuk memfasilitasi pengembangan komunitasnya yang lebih inklusif dan holistik (Barton, 2006).

Dalam upaya membentuk gaya kepemimpinan feminis diperlukan dua level, yaitu membangun tingkat kepercayaan diri perempuan dalam memimpin. Kedua, memberikan perempuan kemampuan, sumber daya, dan akses dalam mengambil keputusan untuk menciptakan sisi lain dari apa yang diciptakan oleh perempuan itu sendiri untuk organisasi atau komunitasnya (Antrobus, 1999:29-44).

⁷ <https://koalisiseni.or.id/perempuan-pekerja-seni-lebih-terbebani-kerja-emosional/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan subjek penelitian Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur (DKD Kalimantan Timur). Metode yang digunakan yaitu *explanatory research* atau dapat juga disebut dengan penelitian kualitatif yang bersifat penjelasan atau dideskripsikan untuk menggambarkan sejauh mungkin, mengenai sudut pandang tentang bagaimana dan mengapa segala sesuatu terjadi. (Veal & Burton, 2014). Penelitian ini mencakup analisis terhadap satu atau beberapa kasus yang mewakili fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks manajemen dan kebijakan seni, studi kasus dapat digunakan untuk memahami praktik manajemen di lembaga seni, dalam hal ini DKD Kalimantan Timur.

Explanatory research dibentuk melampaui deskripsi yang berusaha menjelaskan pola dan tren yang diamati. Seperti halnya penjelasan yang mungkin diperlukan untuk menggambarkan popularitas bentuk suatu seni tertentu, penentangan masyarakat terhadap penyelenggara suatu acara besar, dan fakta bahwa beberapa kelompok sosial memiliki tingkat partisipasi yang sangat rendah dalam berkesenian. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan menimbulkan masalah pelik kausalitas, di mana tujuannya adalah untuk dapat memberikan pernyataan. Seperti misalnya terjadi peningkatan A karena penurunan yang sesuai dalam B. Hal berikut satu hal untuk diketahui bahwa A telah meningkat sementara B telah menurun, tetapi untuk menetapkan bahwa kenaikan A disebabkan oleh penurunan B sering kali merupakan tugas yang jauh lebih berat. Sehingga untuk menetapkan sebab akibat atau kemungkinannya mengharuskan peneliti untuk teliti dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian representasi perempuan dalam tata kelola di DKD Kalimantan Timur akan dilakukan di Gedung Kesenian Provinsi, Studio Komunitas Ladang, Jl. Pramuka Kompleks P dan K, Blok B Nomor 24, Gn. Kelua, Samarinda, Kalimantan

Timur. Adapun subjek penelitian yaitu 1 (satu) Ketua Umum, 1 (satu) Ketua Harian, dan 1 (satu) Ketua III dan 1 (satu) Ketua Komite Sastra di DKD Kalimantan Timur. Informan dipilih berdasarkan partisipasi aktif di dalam setiap kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung diadakan oleh DKD Kalimantan Timur.

C. Waktu Penelitian

Ada Adapun waktu dari rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian Januari-Juni 2023					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Penyusunan Proposal	√					
2	Wawancara	√	√				
3	Pengumpulan dan pengolahan data		√	√			
4	Penulisan Laporan			√	√		
5	Bimbingan dan revisi	√	√	√	√	√	√
6	Ujian TA					√	
7	Revisi					√	√

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian serta sasaran yang akan menjadi objek dalam penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan Representasi Perempuan dalam Tata Kelola DKD Kalimantan Timur. Sehubungan dengan itu, wawancara,

dokumentasi, dan observasi menjadi teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai dalam penelitian ini.

1. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur (Moleong, 2017:233). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Maka, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Adapun wawancara semi terstruktur merupakan bentuk wawancara dengan awalan peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian diperdalam satu persatu lebih lanjut (Arikunto, 2010:270). Sedangkan wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur untuk dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang narasumber dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Peneliti akan menggunakan teknik pengambilan *snowballing sampling* yang sampelnya diambil dengan jumlah sedikit pada awalnya dan berlanjut menjadi besar (Sugiyono, 2019). Narasumber dari penelitian ini adalah Syafril Teha Noer yang merupakan pimpinan dari Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur.
2. Menurut Sugiyono (2016:240) bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, data keanggotaan, gambar hidup, dan sketsa. Dokumen menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara.
3. Observasi merupakan pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap subjek penelitian. Peneliti akan menggunakan lembar dan panduan pengamatan. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi seperti ruang, pelaku, kegiatan, subjek, waktu, dan perasaan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun data dari sumber data di lapangan. Hal tersebut

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain hingga mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini seperti:

1. Pengumpulan Data

Merupakan teknik analisis pertama dari berbagai dokumen yang dikategorisasikan berdasarkan masalah penelitian. Selanjutnya dikembangkan untuk dijadikan bahan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan fokus pada sesuatu yang penting berdasarkan tema dan polanya. Hal ini untuk memberikan gambaran secara jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya (Sugiyono, 2009:247).

3. Penyajian Data

Penyajian data sama dengan menjelaskan penyajian data dalam penelitian kualitatif. Data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk paham situasi yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2009:247).

4. Penarikan Kesimpulan

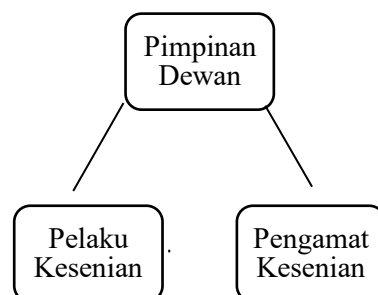
Penarikan kesimpulan merupakan bagian yang dikemukakan namun masih bersifat sementara. Hal tersebut akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang disusun sejak awal, tetapi belum mencapai kepastian. Hal ini dikarenakan masalah dalam rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2009:247).

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

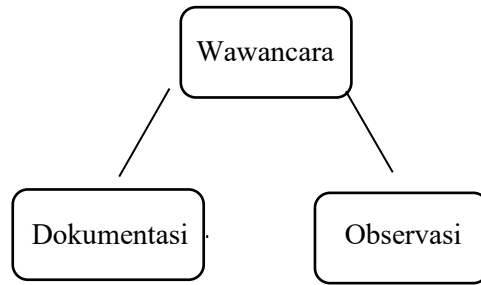
Keabsahan temuan dilakukan untuk mengantisipasi, memprediksi, serta menjaga akan terjadinya suatu kesalahan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Maka, data yang diperoleh oleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, kesalahan dalam pengumpulan data sering terjadi di dalam sebuah penelitian dikarenakan *human error*, pengalaman, dan waktu. Sehingga, dengan adanya pengecekan ulang atas keabsahan temuan ini turut membantu peneliti guna mengantisipasi adanya kesalahan.

Secara teori, pengambilan data memiliki peran yang penting dalam menentukan validasi hasil penelitian. Kesalahan pada data primer akan berakibat langsung dalam hasil analisis yang tidak sesuai dengan masalah yang ingin dijawab. Sehingga, studi akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Suatu hasil penelitian dapat dianggap sah apabila dapat memenuhi kriteria valid, realibel, dan obyektif. Menurut Sugiyono (2019) terdapat 4 (empat) uji yang bisa digunakan untuk mengukur keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Uji kredibilitas (validasi internal) merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Ada beberapa macam cara pengujian kredibilitas data dalam penelitian kualitatif yaitu: (a) perpanjangan pengamatan, (b) peningkatan ketekunan, (c) *triangulasi*, (d) diskusi dengan teman, (e) *member check*.

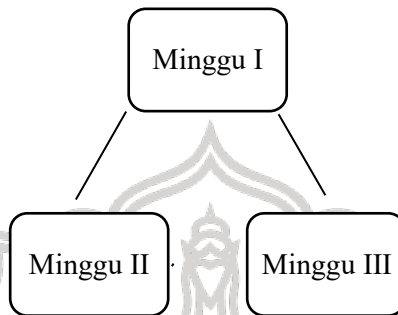
Teknik pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi atau pengujian kredibilitas data yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019). Teknik triangulasi dilakukan sebagai berikut:



Gambar 1: Triangulasi Sumber
Sumber: Diolah oleh Peneliti



Gambar 2 : Triangulasi Teknik
Sumber: Diolah oleh Peneliti



Gambar 3 : Triangulasi Waktu
Sumber: Diolah oleh Peneliti

Melalui tahap-tahap sebagaimana dijelaskan di atas, peneliti dapat meyakinkan pada khalayak bahwa sekalipun instrumen utama adalah peneliti yang disinyalir sarat nuansa subjektivitas karena telah memenuhi kelayakan keabsahan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesenian di Kalimantan Timur

Kesenian di Kalimantan Timur merupakan bagian penting dari warisan budaya dan identitas lokal di wilayah tersebut. Terdapat beberapa kesenian di wilayah Kalimantan Timur seperti tari tradisional, musik tradisional, seni lukis dan patung, teater dan drama, dan seni kerajinan tangan. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan luas wilayah sekitar 127.346,92 km² dengan populasi sebesar 3.575.449 jiwa (2017). Luasnya daerah tersebut berbanding lurus dengan kekayaan seni dan budaya yang dimiliki dari suku aslinya, Suku Dayak. Suku tersebut memiliki beberapa sub Suku Dayak Kutai, Kenyah, Modang, Kayan, Benuaq, Tunjung, Bahau, dan Punan yang sebagian besar tinggal di pedalaman, perbatasan, hingga pegunungan.



Sumber foto: Perpustakaan Digital Budaya Indonesia

Kekuatan dalam kebhinekaan: Perempuan dan Laki-laki Suku Dayak menyatu dalam kesenian. Diakses pada 12 Februari 2023.

Masing-masing dari Suku Dayak juga memiliki perbedaan, baik dari segi bahasa, gaya hidup, tradisi, dan keseniannya. Beberapa kegiatan seni kebudayaan suku dayak meliputi seni tari, seni suara, seni musik, dan seni rupa yang diminati warga sekitar sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara. Suku Tradisional Dayak

memiliki warisan seni yang beragam seperti tarian, musik, dan seni pahat. Sebagai contoh tarian Dayak yang terkenal antara lain Tari Baksa Kembang, Tari Balian, dan Tari Berlian. Ada pula Tarian Suku Banjar yang memiliki tradisi seni seperti Tarian Serampang Dua Belas dan musik tradisional Gambus Banjar dan Hadrah. Terdapat juga Tarian Adat Kutai dengan tarian khas Gantar dan Tarian Nandak. Pada Seni Tari dan Musik Melayu di Kalimantan Timur yang merupakan pengaruh dari budaya Melayu seperti Tari Zapin, Tari Serampang Dua Belas dengan musik tradisional Gambus Melayu dan Hadrah. Selain itu ada Seni Ukir Kayu yang menjadi penting dari budaya Kalimantan Timur. Kayu yang diukir dengan motif-motif tradisional yang indah dan menjadi ornamen pada rumah tradisional Dayak dan suku-suku lainnya di Kalimantan Timur. Terdapat juga Seni Anyaman yang merupakan bagian dari budaya Kalimantan Timur. Anyaman berbagai bahan dari rotan, bambu, dan daun pandan digunakan untuk membuat kerajinan tangan seperti tikar, tas, dan topi.

Tarian dan musik memiliki peran penting dalam Kerajaan Kutai Kartanegara. Biasanya, tarian dan musik dilakukan secara kolektif oleh masyarakat dan dibagi berdasarkan jenis kelamin. Terdapat tarian khusus untuk laki-laki dan perempuan yang menggambarkan perbedaan peran dan identitas gender. Seperti halnya Tarian Hudoq yang merupakan tarian tradisional Dayak di Kalimantan Timur. Dalam tarian ini, laki-laki mengenakan kostum hewan yang melambangkan kekuatan dan keberanian, seperti harimau, babi hutan, atau burung hantu. Sedangkan perempuan mengenakan pakaian adat dan berperan sebagai pemanis atau pendamping laki-laki. Tarian ini melambangkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Terdapat juga Tarian Bebanci yang merupakan berasal dari Suku Banjar di Kalimantan Timur. Dalam tarian ini, laki-laki berperan sebagai penari utama dan mengenakan kostum perempuan lengkap dengan pakaian, riasan, dan gerakan feminin. Tarian ini dimaksudkan untuk menghibur dan menampilkan gerakan penari laki-laki dalam menggambarkan peran perempuan.



Sumber Foto: encyclopedia.jakarta.tourism.co.id-Tari Hudoq

Tari Hudoq merupakan salah satu upaya dalam melestarikan warisan budaya Suku Dayak. Tarian ini menjadi sarana untuk mempertahankan dan memperkenalkan budaya Dayak kepada generasi muda dan masyarakat umum. Diakses pada 12 Februari 2023.

Tarian lainnya disebut Tari Giring-giring merupakan tarian tradisional Kutai yang biasanya ditampilkan dalam acara adat atau upacara. Dalam tarian ini, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda. Laki-laki bertindak sebagai penari yang menampilkan gerakan energik dan kuat, sementara perempuan berperan sebagai penari pengiring dengan gerakan yang lebih halus dan anggun. Adapula Tarian Samrah yang berasal dari suku Berau di Kalimantan Timur. Dalam tarian ini, laki-laki dan perempuan juga memiliki peran yang berbeda seperti Tari Giring-giring. Terdapat juga Tari Samrah juga ditampilkan dalam acara keagamaan yang berasal dari Suku Bugis di Kalimantan Timur. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara peringatan agama Islam. Tari Samrah dilakukan oleh sekelompok perempuan yang memakai pakaian tradisional Bugis. Gerakan dalam tarian ini dilakukan secara bertahap dan ritmis, sesuai dengan irama lagu yang dinyanyikan oleh penari. Tarian ini melambangkan kerukunan dan kebersamaan dalam beragama.



Sumber Foto: [adira.co.id-upacara tiwah](http://adira.co.id-upacara-tiwah). Upacara Tiwah merupakan aktivitas sacral dan memiliki signifikansi yang mendalam bagi Suku Dayak di Kalimantan Timur. Melalui upacara ini, mereka berupaya menghormati leluhur, memperkuat ikatan sosial, dan mempertahankan identitas budaya suku tersebut. Diakses pada 13 Februari 2023.

Adapun seni tari yang berkembang di Kalimantan Timur adalah Tari Belian. Tarian tersebut dilakukan oleh perempuan yang disebut berdewa dan laki-laki yang dinamakan Belian. Tari tersebut juga memiliki macam-macam jenis dengan tujuan dan maksud yang berbeda, seperti belian pengobatan, belian membayar niat, belian pelas tahun, dan belian nuaq. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang berlokasi di Tepian Sungai Mahakam Kalimantan Timur. Kerajaan tersebut juga terus melestarikan kesenian tradisi keraton yaitu Tari Topeng Kemindu. Tarian tersebut didendangkan sejak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Tarian ini biasanya dibawakan dalam perhelatan besar Kesultanan di antaranya Penobatan Raja/Sultan, Kaseh Selamat Sultan, Perkawinan Adat Kesultanan Kutai, Upacara Adat Erau, dan Penganugerahan Gelar Bangsawan Keraton. Tari Topeng Kemindu dahulu hanya dibawakan oleh kalangan bangsawan kerajaan. Seiring berjalannya waktu, tarian ini dapat ditarikan oleh masyarakat di luar lingkungan keraton.



Sumber Foto: backpackerjakarta.com-tari belian. Tari Belian adalah bagian integral dari budaya Suku Dayak di Kalimantan Timur. Melalui tarian ini, tradisi, spiritual, dan identitas budaya Suku Dayak dapat dilestarikan dan diapresiasi oleh masyarakat setempat dan pengunjung. Diakses pada 13 Februari 2023.

Perubahan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Sultan H. Adji Mohamad Salehoeddin II dengan tujuan agar tetap menjaga adat istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Sehingga dengan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya, adat istiadat sebagai upaya untuk menjaga warisan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah punah oleh perkembangan zaman. Tari Topeng Kemindu merupakan tarian yang menceritakan tentang seorang putri sedang bermain-main di taman untuk menghirup udara segar sambil menari dan setelah itu kembali ke istana untuk beristirahat. Tarian tersebut dibawakan oleh perempuan dengan menggunakan topeng kayu. Tari Topeng Kemindu ini merupakan tarian suci dan keramat yang bersifat sakral, dan tidak ada di daerah lain. Melalui tarian tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan di masa Kerajaan Kutai Kartanegara telah memiliki peran penting, tidak hanya sebagai penari tetapi juga keberadaannya telah diperhitungkan sebagai makhluk sosial yang memiliki peran setara dengan laki-laki dalam aspek ruang kesenian. Secara terselubung, prinsip gender di dalam

Kerajaan Kutai Kartanegara telah menganulir di dalamnya dengan menempatkan perempuan pada proses tradisi suci dan sakral.

Peran gender juga berpengaruh dalam seni pertunjukan pada zaman Kerajaan Kutai Kartanegara. Hal ini terlihat dari seni pertunjukan yang melibatkan peran perempuan. Misalnya, teater bayang (wayang) yang sering melibatkan perempuan sebagai dalang atau penari untuk memainkan karakter tertentu dalam cerita. Meski terdapat peran gender di dalam aspek ruang kesenian pada zaman Kerajaan Kutai Kartanegara, namun lingkungan kerajaan masih memangku sistem patriarki. Seperti halnya peran laki-laki berada di politik, militer, dan administratif, sementara perempuan memiliki peran sebagai pengatur rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Terlihat bahwa adanya perbedaan peran gender dalam seni dan kehidupan masyarakat pada zaman Kerajaan Kutai Kartanegara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi gender dapat beragam dan kompleks tergantung pada faktor budaya, status sosial, dan konteks historis. Interpretasi dan implementasi peran gender dalam seni dapat bervariasi di antara individu dan komunitas yang berbeda.

Di Kota Samarinda sendiri, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran dalam memberikan fasilitas untuk mengangkat kesenian dan kebudayaan daerah dalam konteks perdagangannya. Di sana banyak kerajinan tangan khas Suku Dayak yang bisa didapatkan dalam berbagai bentuk dan warna. Adapun hal lainnya, pemerintah Kota Samarinda juga secara rutin mengadakan acara tahunan yang mengangkat seni tradisional seperti Festival Kemilau Seni Budaya Etam yang di dalamnya terdapat berbagai perlombaan seperti kompetisi memamerkan busana, musik, lagu, dan lomba tari tradisional kreasi pesisir dan pedalaman. Selain itu juga pernah dilombakan olahraga tradisional *begasing* atau menyumpit. Acara tahunan ini digelar sebagai salah satu cara untuk mewujudkan visi dan pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan wisata dengan minat khusus berbasis alam dan budaya menuju kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Kesenian dan Kebudayaan Suku Dayak Kalimantan Timur bukan hanya mampu mewujudkan visi pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, melainkan juga sebagai langkah baru untuk Kota Samarinda dalam meningkatkan fasilitas kota

yang mengangkat kebudayaan daerah. Terlebih lagi untuk menjadi wadah bagi masyarakat Suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan yang patut dijaga kelestariannya. Pada aspek seni sastra, jenis folklor atau cerita rakyat merupakan salah satu unsur seni yang berkembang di masyarakat Suku Dayak di Kalimantan Timur. Syair Ganda Kesuma merupakan seni sastra yang telah berkembang pada zaman kuno di Kalimantan Timur. Syair tersebut diperkirakan berasal dari masa Kutai Martapura meski jika dilihat dari gaya bahasanya syair tersebut juga kemungkinan berasal dari zaman Kutai Kartanegara.

Aspek seni ukir dan seni bangunan juga memainkan peran dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai Kartanegara. Pada umumnya, seni ukir lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan cenderung terlibat dalam pembuatan dan menghias di bangunan seperti ukiran pintu, jendela, atau dekorasi rumah. Tak kalah penting, peran gender juga terlihat pada seni membatik dan menenun. Seni tekstil seperti batik dan tenun memiliki hubungan dengan gender pada zaman Kerajaan Kutai Kartanegara. Pembuatan batik dan tenun biasanya dilakukan oleh perempuan sebagai pekerjaan rumah tangga. Motif dan warna yang digunakan dalam batik dan tenun sering kali mencerminkan status sosial dan identitas gender.



Foto: zonautara.com/Ronny A. Buol

Praktik tato pada perempuan Suku Dayak adalah bagian dari konteks budaya yang kaya dan

kompleks. Penting untuk dihormati dan memahami nilai-nilai yang melekat pada praktik tato serta menghargai perspektif dan pengalaman perempuan Suku Dayak. Diakses pada 13 Februari 2023

Terdapat juga seni tato yang memiliki peran penting dalam budaya Suku Dayak di Kalimantan Timur. Tato dalam Suku Dayak dikenal dengan sebutan tato ukir atau tato kayu. Teknik seni tato Suku Dayak berbeda dengan tato modern. Hal tersebut terlihat dari penggunaan alat tradisional seperti duri pohon jeruk atau salak sebagai jarum tato. Tinta tato yang digunakan juga menggunakan jelaga yang dicampur madu lebah liar. Hal tersebut yang menyebabkan tato Suku Dayak hanya bercorak warna hitam saja.⁸ “Duri pohon jeruk atau salah untuk membuat lubang-lubang kecil dalam tubuh, selanjutnya dioleskan tinta jelaga bercampur madu. Penggunaan madu agar tidak terjadi infeksi,” kata Pengrajin seni tato Dayak David Christian kepada IDNtimes, Selasa (9/3/2021).

Tato dalam Suku Dayak memiliki makna dan simbolisme yang mendalam. Setiap motif tato dapat mewakili identitas suku, status sosial, pencapaian, atau cerita mitologis dalam budaya Suku Dayak. Tato juga dapat mencerminkan keyakinan spiritual atau perlindungan suku dari roh jahat. Tato dalam Suku Dayak biasanya ditempatkan di bagian-bagian tertentu dari tubuh, seperti lengan, dada, paha, atau punggung. Setiap bagian tubuh yang diberikan tato dapat memiliki makna dan simbolisme yang berbeda tergantung pada motif dan desain yang digunakan. Dalam konteks identitas dan status sosial, tato dalam Suku Daya menjadi penanda. Beberapa motif tato diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki status tertentu seperti pemimpin adat, kepala suku, atau pejuang yang berjasa. Tato tersebut menunjukkan keberanian individu dalam masyarakat Suku Dayak.

Tato pada Suku Dayak Kalimantan Timur tidak hanya umum di kalangan laki-laki, tetapi juga di kalangan perempuan. Tato Suku Daya pada perempuan sering kali memiliki motif dan desain yang khas seperti binatang, tumbuhan, bentuk geometris, dan simbol-simbol mitologis. Desain-desain ini diukur dengan detail dan cermat untuk menciptakan keindahan artistik yang unik. Keterkaitan tato dengan peran perempuan dalam masyarakat berhubungan dengan status

⁸ Wibisono, Sri, “6 Motif Tato Suku Dayak, dari Simbol Kekuatan hingga Kematian,” <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/sri-wibisono/6-motif-tato-suku-dayak-dari-simbol-kekuatan-hingga-kematian?page=all> diakses pada 12 Februari 2023

sosial. Seperti misalnya tato perempuan yang menikah dan menjadi ibu dapat melambangkan kesuburan, kebahagiaan, dan perlindungan terhadap keluarga. Tato juga bisa menjadi penanda penghargaan terhadap keterampilan atau keberanian perempuan dalam budaya di Suku Dayak.

Pada seni arsitektur sendiri dapat dilihat pada bangunan-bangunan rumah panjang yang mempunyai ciri-ciri gaya tersendiri. Peninggalan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai seni rupa yaitu seni pahat. Hal itu dapat dijumpai pada patung-patung kayu yang dibuat oleh masyarakat Suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Selain patung-patung kayu, terdapat juga topeng-topeng kayu yang dipakai pada waktu menari saat upacara-upacara tertentu seperti upacara panen padi. Dalam pembuatan seni pahat ini, masyarakat Suku Dayak menggunakan pola yang berlandaskan imajinasi bentuk wajah-wajah roh perusak dari kepercayaan suku tersebut. Oleh karena itu patung-patung dan topeng-topeng yang dibuat cenderung memperlihatkan wajah-wajah yang menakutkan.

Pada seni lukis tradisional pada khusus dan umumnya digunakan untuk upacara keagamaan. Bentuk kesenian ini harus mengabdikan pada makhluk halus. Seperti halnya, lukisan pada dinding rumah atau lukisan pada tubuh seseorang pada umumnya berfungsi untuk mencari persahabatan dengan makhluk halus yang berada di luar diri manusia, sehingga mendatangkan pengaruh magis untuk menambah kekuatan manusia tersebut atau mendatangkan ketentraman kepada keluarga penghuni. Maka dapat dikatakan bahwa kesenian tradisional pada umumnya dan seni lukis pada khususnya mengandung arti simbolik untuk menggambarkan sesuatu. Hal lainnya pada seni pertunjukan yang memiliki pengertian luas karena di dalamnya terkandung banyak unsur seni seperti seni musik, seni tari, seni sastra, dan seni drama. Hal ini dikarenakan perkembangan dari semua unsur seni tersebut banyak dipengaruhi oleh kehidupan ritual dari masyarakat Suku Dayak untuk upacara adat.

Di sisi lain, terdapat keunikan tersendiri untuk masyarakat Dayak dalam penggunaan perhiasan, di samping Pulau Kalimantan juga merupakan salah satu daerah penghasil emas pada zaman dahulu. Masyarakat Suku Dayak lebih memilih untuk menggunakan manik-manik maupun tulang sebagai bahan membuat perhiasan. Hal ini dikarenakan manik-manik lebih memiliki nilai yang

lebih tinggi daripada emas. Selain manik-manik, masyarakat Suku Dayak juga menggunakan perhiasan dari perunggu dan kuningan. Seni perhiasan untuk perempuan Dayak Daratan, Ngaju, Iban, Maloh, dan Dusun memakai sejenis korset yang dibuat dari batang-batang rotan dan dipenuhi dengan rangkaian cincin logam. Di samping perhiasan dari logam, perempuan dayak juga menggunakan perhiasan dari kerang dan gading. Manik-manik, mata uang, kerang, dan giring-giring perunggu dibuat untuk menghiasi ikat pinggang, tudung kepala dan pakaian. Sedangkan pada pria dayak dewasa menggunakan hiasan telinga dengan motif naga atau aso yang dibuat dari kuningan, tandung rusa, atau paruh burung enggang. Tradisi dan adat istiadat bergotong royong melestarikan kesenian dan kebudayaan lambat laun bergeser, meski peran Kerajaan Kutai Kartanegara masih kuat. Pergeseran tersebut dimulai munculnya Dewan Kesenian yang dibentuk oleh negara. Dewan Kesenian belum mengakui keberadaan perempuan dalam ruang tata kelola seni meski negara telah melegitimasi peran perempuan di dalam ruang ekspresi seni.



Sumber Foto: Darwi Salwan-perhiasan suku Dayak. Perhiasan Suku Dayak memiliki keindahan estetika yang tinggi dan juga nilai budaya simbolik mendalam.

Perhiasan ini merupakan ekspresi identitas budaya, kekayaan seni, dan tradisi Suku Dayak yang unik. Diakses pada 13 Februari 2023.

Berdasarkan informasi di atas, dapat dikatakan bahwa konstruksi gender telah menganulir sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara. Meski demikian dapat dipahami bahwa konstruksi gender dalam kesenian dan kebudayaan di Kalimantan Timur memiliki variasi antara suku atau etnis yang berbeda, dan tidak semua aspek seni memasukan konsep gender. Sehingga, konsep ruang ekspresi seni yang diciptakan sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara ini merupakan pengakuan terhadap berbagai bentuk ekspresi seni, termasuk peran gender. Setiap bentuk dan peran ekspresi seni dihargai dan dianggap memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, emosi, atau gagasan yang berarti. Pendekatan yang dilakukan sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara menekankan pada keberagaman dan inklusivitas dalam dunia seni. Tidak ada satu bentuk ekspresi seni yang dominan atau lebih bernilai. Meski begitu, aspek gender pada ruang lingkup di luar kesenian belum terlihat setara pada zaman itu.

Pentingnya ruang ekspresi seni yang setara adalah untuk menghargai keanekaragaman budaya, perspektif, dan gaya dalam seni. Hal ini juga mendorong inklusivitas dan kesetaraan dalam memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengekspresikan diri dan menghargai karya seni tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, ruang ekspresi seni yang setara mendorong kolaborasi antara berbagai bentuk seni dan pemahaman bahwa setiap bentuk ekspresi seni dapat memberikan sumbangan unik dalam menyampaikan pesan atau menginspirasi penonton. Hal ini mempromosikan keragaman seni dan memberikan penghargaan kepada setiap bentuk ekspresi seni sebagai bagian integral dari warisan budaya manusia.

Konsep ruang ekspresi dalam seni merujuk pada lingkungan atau konteks di mana seniman mengungkapkan diri dan karya seninya. Menurut Michel Foucault, seorang ahli teori dan filsafat Prancis bahwa terdapat konsep “heterotopia” yang mengacu pada ruang alternatif atau ruang perantara yang terdapat dalam masyarakat. Foucault berpendapat bahwa seni menciptakan heterotopia di mana norma-norma sosial dapat dilewati dan pengalaman alternatif dapat ditemukan. Lebih lanjut, di dalam artikelnya Sadewa (2020) mengemukakan bahwa prinsip pertama dalam heterotopia adalah kemungkinan

hadirnya kebudayaan yang tidak tunggal dalam dunia, yang gagal untuk mengkonstitusikan heterotopia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa heterotopia jelas mengambil bentuk yang sangat beragam, dari aspek kesenian juga peran-peran dari para seniman yang menghasilkan karya itu sendiri.

Sedangkan menurut Bell Hooks, seorang penulis dan kritikus sosial mengemukakan bahwa pentingnya menyoroti inklusivitas dalam ruang ekspresi seni yang setara. Ruang ekspresi seni yang setara mengakui dan menghormati identitas, latar belakang, dan pengalaman yang ada dalam masyarakat, serta menghindari dominasi satu kelompok atau perspektif atas yang lainnya. Dalam kondisi kesenian dan kebudayaan pada zaman Kerajaan Kutai Kertanegara, hal tersebut sudah dilakukan meski terdapat peran-peran yang masih bias gender. Seperti halnya, pada zaman itu, perempuan berkesempatan untuk menghias ukiran kayu dibandingkan laki-laki. Namun, hal tersebut telah memperlihatkan bahwa adanya pembagian peran di dalam ruang lingkup kesenian.

B. Tata Kelola Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur

Sistem kenegaraan Indonesia telah memandang seni sebagai bagian penting dari budaya dan identitas nasional sebelum terbentuknya Dewan Kesenian Indonesia pada tahun 1946. Pada masa itu, seni dianggap sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan. Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan seni melalui berbagai lembaga dan program, seperti Seksi Kesenian pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun tidak ada struktur organisasi khusus yang fokus pada kesenian seperti Dewan Kesenian, pada saat itu pemerintah mendorong pertumbuhan seni dengan menyelenggarakan festival, pameran, dan acara seni lainnya.⁹

Seni tradisional dan seni rakyat mendapat perhatian dalam upaya melestarikan warisan budaya Indonesia. Selain itu, seniman juga mendapatkan dukungan dari masyarakat dan organisasi-organisasi kebudayaan yang aktif pada masa itu. Kelompok seniman dan budayawan, seperti Persatuan Ahli Gamelan Indonesia (PAGI) dan Persatuan Penulis Indonesia (PPI), berperan penting dalam mempromosikan seni dan kebudayaan. Dalam rangka meningkatkan peran seni

⁹ “Kebudayaan Memiliki Peran Strategis Bagi Sebuah Bangsa”, Kemenko PMK, 18 Juni 2023 <https://www.kemenkopmk.go.id/kebudayaan-memiliki-peran-strategis-bagi-sebuah-bangsa>

untuk pembangunan nasional, Dewan Kesenian Indonesia didirikan sebagai lembaga formal yang bertujuan mengkoordinasikan dan memajukan berbagai bentuk seni di Indonesia. Hal tersebut mencerminkan pengakuan yang lebih kongkret dan terstruktur terhadap pentingnya seni dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kembali sebelum terbentuknya Dewan Kesenian Indonesia, sistem kenegaraan Indonesia telah memiliki pandangan yang bervariasi terhadap perempuan dalam seni. Meskipun demikian, pada umumnya perempuan dalam seni dihargai dan diakui kontribusinya dengan sangat terbatas. Batasan-batasan sosial dan budaya yang mempengaruhi peran perempuan dalam seni pada masa itu. Pada beberapa bentuk seni tradisional Indonesia, perempuan memiliki peran yang signifikan misalnya, dalam seni tari. Perempuan sering menjadi penjaga tradisi dan menjalankan peran sebagai penari utama. Perempuan dihormati sebagai pembawa warisan budaya dan menjaga keaslian gerakan dan estetika tari.

Perempuan juga menghadapi keterbatasan dalam berpartisipasi dalam seni secara lebih luas. Seperti halnya di dalam beberapa bentuk seni tertentu, terutama seni lukis dan sastra yang lebih didominasi oleh pelaku seni laki-laki. Hal ini berkaitan dengan faktor sosial, budaya, pendidikan yang membatasi akses perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia seni. Kendati demikian, terdapat perempuan yang telah memberikan kontribusi berharga dalam seni sebelum terbentuknya Dewan Kesenian, seperti Kartini seni kepenulisan. Meskipun terdapat tantangan dan hambatan, perempuan berupaya melibatkan diri dalam seni dan berusaha memperoleh pengakuan atas bakat dan karyanya.

Perjuangan Kartini membuahkan hasil dan telah dilegitimasi oleh negara Indonesia melalui kebijakan serta perayaan yang diakui secara resmi setiap tanggal 21 April. Kebijakan yang dibentuk sebelum adanya Dewan Kesenian tersebut berisi tentang dedikasi penghormatan, perjuangan, serta sumbangsih Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan dan pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Perayaan Hari Kartini diakui oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan resmi dan peringatan yang diselenggarakan di berbagai tingkat. Sejarah pergerakan perempuan juga terlihat

dari Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan pada 22-25 Desember 1928. Kongres yang diselenggarakan di Yogyakarta tersebut menjadi tonggak penting dalam perjuangan perempuan Indonesia untuk kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Pada kongres tersebut, gerakan perempuan Indonesia menyuarkan tuntutannya seperti hak memperoleh pendidikan, hak politik, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Pada era 1940-an, gerakan emansipasi perempuan semakin berkembang dan melibatkan berbagai organisasi perempuan. Pada saat itu, kelompok-kelompok perempuan aktif memperjuangkan hak-hak perempuan seperti yang dilakukan pada tahun 1928. Hingga pada tanggal 22 Desember 1949, setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Hari Perempuan Nasional pertama kali diperingati sebagai pengakuan terhadap peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan menghormati kontribusi perempuan di berbagai bidang.

Seiring dengan perjuangan terus-menerus untuk kesetaraan gender, akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.¹⁰

Seiring berjalannya waktu, gerakan perempuan semakin maju di setiap tahunnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama di dalam dunia seni. Meski Hari Kartini, Hari Perempuan Indonesia, dan Hari Kesetaraan Gender Nasional telah diakui negara, namun perempuan belum mencapai di posisi yang

¹⁰ “Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia, 18 Juni 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>

sama dengan laki-laki di dalam dunia seni. Dewan Kesenian Indonesia belum dapat melaksanakan pengakuannya atas peran perempuan di dalam dunia kesenian. Setelah terbentuknya Dewan Kesenian Indonesia, terjadi upaya untuk memperkuat upaya pengembangan seni di tingkat lokal. Pada periode tersebut, beberapa kota dan provinsi membentuk Dewan Kesenian setempat sebagai wadah koordinasi dan pengembangan seni di masing-masing wilayah.

Hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang mana mendorong pembentukan Dewan Kesenian di tingkat kota dan provinsi sebagai bagian dari upaya pemantapan seni dan budaya nasional. Pemerintah menganggap Dewan Kesenian sebagai lembaga yang dapat mendukung program-program kebudayaan nasional dan memajukan seni di daerah. Selama periode tersebut pula, banyak Dewan Kesenian kota dan provinsi yang didirikan dengan dukungan dan bimbingan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) oleh Jenderal Rudini dengan instruksi Mendagri Nomor 5A yang antara lain menghimbau para gubernur untuk memfasilitasi Dewan Kesenian. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh para gubernur dan bupati-walikota untuk mendukung keberadaan Dewan Kesenian Samarinda yang telah terbentuk sejak 1980 oleh almarhum HA Rizani. Di masa reformasi hingga sekarang, peran dan status Dewan Kesenian kota serta provinsi mengalami perubahan yang lebih terkait dengan kewenangan daerah. Pembentukan Dewan Kesenian kini sering kali melibatkan kebijakan dan proses yang lebih terkait dengan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengelolaan Dewan Kesenian.

Hingga di tahun 1996, masyarakat kesenian memutuskan untuk membentuk Dewan Kesenian Daerah dengan kebijakan otonomi daerah yang telah diputuskan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Kesepakatan tersebut dibuat agar Dewan Kesenian level kota di Kalimantan Timur dapat berkolaborasi dan mengkoordinasikan aktivitas seni di level kota dan kabupaten. Meski demikian, hal tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu berkaitan dengan DKD Kaltim mengalihkan fokus pada penguatan alas hukum kelembagaan agar mendapatkan dukungan penuh, yang tidak hanya berupa moril melainkan juga pendanaan, dari peraturan gubernur melalui Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan.

Saat itu eksistensi kegiatan seni dan kebudayaan di Kalimantan Timur tetap bergantung pada inisiasi seniman atau tokoh tertentu dengan prinsip gotong royong. Adanya Dewan Kesenian menjadikan masyarakat kesenian untuk mengandalkan bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, atau Pemerintah Kabupaten agar mendapatkan dukungan pendanaan, meski yang didapatkan berupa dukungan moril. Alih-alih memberikan dukungan berupa dana kepada Dewan Kesenian kota, Pemerintah Provinsi sendiri berusaha untuk mewadahi masyarakat kesenian dalam Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia (BKKNi). Hal tersebut membuat pemerintah dan Dewan Kesenian kota semakin berjarak dari pusat-pusat kekuasaan pemerintahan, berikut juga dengan dukungan-dukungan berupa pendanaan.



Foto: Tampak Depan Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur

Pada masa ke masa DKD Kaltim menjadi lembaga yang menjadi pusat kegiatan seni di Kalimantan Timur. Mulai dari pelatihan festival teater, pelatihan sastra dan pembuatan film, magang seni hingga kolaborasi pementasan di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1996-2001 DKD Kalimantan Timur berupaya untuk membangun jaringan melalui kegiatan pelatihan dan magang yang diketuai oleh HA Waris Husein dan ketua harian HA Rizani Asnawi. Pada periode

selanjutnya, yaitu 2001-2006 DKD Kalimantan Timur mengalami vakum hingga bangkit kembali pada tahun 2006-2011 dengan ketua umum H. Ahmad Amins dan ketua harian Johansyah Balham dengan sekretaris umum H. Hamdani. Saat itu DKD Kaltim masih meneruskan untuk memperluas jaringan bersama para seniman di Kalimantan Timur melalui berbagai kegiatan pelatihan. Di samping itu juga, DKD Kaltim juga mengadakan dan turut berkontribusi dalam festival-festival seni seperti Festival Seni Kalimantan Timur Bangkit, Festival Cak Durasim Surabaya, bekerjasama dengan Yayasan Sentawar mengadakan Dialog Sastra Borneo bersama seniman nasional dan luar negeri.

Pada periode yang sama, DKD Kalimantan Timur bersama pemerintah setempat membentuk Dewan Kesenian PPU, Dewan Kesenian Balikpapan, Dewan Kesenian Berau, dan Dewan Kesenian Kutai Timur. Pada periode selanjutnya yaitu 2011-2016, tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh DKD Kalimantan Timur namun telah mengadakan Apel Akbar Seni Budaya Kaltim, melantik Dewan Kesenian Samarinda, dan turut berkontribusi pada kegiatan di Anjungan Kaltim TMII. Pada periode 2016-2021, DKD Kalimantan Timur lebih banyak berkecimpung pada penguatan kelembagaan seperti mengusulkan peraturan daerah kesenian dan pemajuan kebudayaan, mengusulkan peraturan gubernur tentang Dewan Kesenian, konsolidasi organisasi Dewan Kesenian se-Kalimantan Timur, menjadi tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kalimantan Timur, menghadiri rembuk dinas kebudayaan nasional, dan membentuk Dewan Kesenian Bontang, Kutai Barat, dan Mahulu bersama pemerintah daerah setempat.



Foto: Tampak Dalam Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur

Pada masa kepemimpinan H. Syafril Teha Noer, program DKD Kalimantan Timur disusun untuk menguatkan struktur organisasi kelembagaan. Penguatan DKD Kalimantan Timur semakin menjadi fokus pada kepengurusan masa 2021-2026. Menurut informan, H. Syafril Teha Noer, bahwa perlu penguatan yang lebih fokus untuk DKD Kalimantan Timur pada aspek fungsi dan tujuan adanya lembaga tersebut. Selain sebagai mitra pemerintah di bidang kesenian, DKD Kalimantan Timur perlu memberikan pemahaman kepada para masyarakat kesenian, bahwa DKD Kalimantan Timur merupakan wadah yang dapat menjadi tempat para seniman berkumpul dan melakukan aktivitas kreatif. Upaya tersebut menjadi rencana kegiatan pada tahun 2023 dengan aktivitas sosialisasi Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Gubernur tentang Dewan Kesenian di 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Dilihat dari pembagian peran kerja DKD dari masa ke masa, kepemimpinan perempuan tidak menjadi persoalan yang berarti. Namun, Syafril Teha Noer berupaya untuk memberikan peran terhadap perempuan berada di dalam setiap komite. Sebagai contoh nyata bahwa di setiap komite memiliki keterwakilan 1 (satu) hingga 2 (dua) perempuan, meski tidak pada posisi ketua. Hal tersebut dikarenakan alur dan fokus kerja DKD Kalimantan Timur yang belum berfokus pada perempuan untuk menjadi pemimpin. Di dalam pengurus harian sendiri, terdapat 1 (satu) perempuan dari 5 (lima) pengurus inti. Dapat dilihat tabel di bawah terdapat 1 (satu) pemimpin perempuan yaitu Dr. Aji Qamara Hakim sebagai Ketua Harian III. Menurut Dr. Aji Qamara Hakim bahwa dirinya bertanggung jawab atas Komite Tari dan Musik. Kegiatan yang dilakukannya sehubungan dengan memberikan pelatihan-pelatihan terkait tari-tari tradisional dan musik etnis Kalimantan Timur.

Tabel Pengurus Harian
DKD Kalimantan Timur 2021-2026

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
H. Syafril Teha Noer	Ketua Umum	Perencanaan strategis dan pengambil keputusan untuk pengembangan serta promosi kesenian di wilayah Kalimantan Timur
Drs. H. Hamdani	Ketua Harian	Berkoordinasi untuk semua kegiatan di DKD Kalimantan Timur seperti mengatur jadwal pertemuan, monitor dan melaporkan perkembangan kegiatan kepada anggota dewan dan instansi terkait.

Mukhransyah	Ketua I	Memimpin dan mengelola bidang atau divisi di dalam DKD Kalimantan Timur.
Irwan Dharmansyah	Ketua II	Mengelola sumber daya yang ada seperti anggaran, personel, fasilitas, dan peralatan.
Dr. Aji Qamara Hakim	Ketua III	Melakukan pemantauan dan evaluasi serta membuat kegiatan di Komite Musik dan Tari.
Drs. Herman A. Salam, M. Psi	Sekretaris Umum	Mengelola administrasi harian di DKD Kalimantan Timur, meliputi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, pembuatan dan pengarsipan surat-menyurat, manajemen data serta pengelolaan jadwal dan agenda organisasi.

Komite-Komite

DKD Kalimantan Timur 2021-2026

1. Komite Teater

- a. Irwansyah (Koordinator)
- b. Wiwin Sugiarti
- c. Suriansyah
- d. Bahtara Yudha
- e. Mohammad Toyib

2. Komite Sastra

- a. Aminuddin Rifai, M.A (Koordinator)
- b. Chai Siswadi
- c. Uni Sagena, Ph.D.

- d. H. Fajar Fahrudin, S. Kom, MH.
 - e. H. Habol Hasan Anshary
3. Komite Tari
- a. M. Hatta (Koordinator)
 - b. Rozani Puspita Rinda
 - c. Mycristy
 - d. Hapsah, S. Kom
 - e. Firmansyah
4. Komite Musik
- a. Tri Andi Yuniarso (Koordinator)
 - b. Asrani, S. Pd, M.Si
 - c. Wuri Handayani, M.Pd
 - d. Zairelawati
 - e. Zainal Abdi, S. Sos
5. Komite Seni Rupa
- a. H. Agus Dwi Utomo, S. Pd (Koordinator)
 - b. Cadio Tarompo
 - c. Syamsuddin Muslimin
 - d. Lukmasono
 - e. M. Hafizd
6. Komite Film dan Multimedia
- a. Jundro Daud H, S. Kom, M. Kom (Koordinator)
 - b. Iswardati, M. Pd
 - c. Fresy Masahengke
 - d. Erwin Syahputra
 - e. Fatqurrozi
7. Komite Penelitian dan Pengembangan
- a. Syaiful Mataliti (Koordinator)
 - b. Dahri Dahlan, M. Pd
 - c. Ir. Erly Rosita, M. P
 - d. Kritaya Zenaida Rizani
 - e. Theresia Hosanna

Pernyataan Ketua Umum, Syafril Teha Noer dikonfirmasi oleh Ketua Harian, Drs. H. Hamdani bahwa peran perempuan di dalam kepengurusan DKD Kalimantan Timur terbilang sedikit dan belum menjadi persoalan yang berarti. Hal tersebut juga didasari dengan kurangnya sumber daya manusia yang tergabung di dalam DKD Kalimantan Timur.

“Kita mengupayakan, memang gak ada persentase tapi setiap komite itu minimal 1 (satu) perempuan, karena jujur SDM kita untuk kesenian terbilang kurang, tapi tetap kita harus ada seniman atau penikmat seni, atau organisator yang berkaitan dengan kesenian itu terlibat hadir, mulai kepengurusan dewan pertimbangan sampai di dewan pengurus harian, komite-komite.” (Hamdani, Ketua Harian DKD Kalimantan Timur, 13 Maret 2023).

Padahal terdapat banyak sekali seniman perempuan yang berkontribusi nyata pada karyanya dan dapat dilibatkan dalam kepengurusan DKD Kalimantan Timur, seperti Noni Nabunome, seorang seniman visual yang dikenal dengan teknik karya lukis, kolase, dan instalasi untuk mengeksplorasi isu-isu lingkungan dan berkelanjutan. Terdapat juga Dewi Rahmanita seorang seniman lukis yang menggambarkan alam Kalimantan dengan penuh warna dan detail, Pupung Dewayani yang ahli dalam seni instalasi dan performans berbicara kepedulian terhadap lingkungan dan isu-isu sosial, dan masih banyak nama lagi seperti Indri Yuliarti, Ivon Fauziah, Aneka Patria, dan Dewi Kartika Sari.

Adapun kontribusi DKD Kalimantan Timur dalam mengarusutamakan gender di dalam kelembagaan yaitu dengan melibatkan pengurus harian atau bagian komite untuk dapat hadir di dalam pertemuan yang ditujukan kepada lembaga. Hal tersebut sebagai upaya pemanfaatan kemampuan dari perempuan itu sendiri daripada identitasnya sebagai perempuan. Di sisi lain, Aji Qomara Hakim sebagai Ketua Harian III menyatakan bahwa dirinya dianggap terlalu “keras” dalam mengutarakan pendapat. Hal tersebut sering terjadi jika dirinya memberikan pendapat yang berbeda di depan pengurus DKD Kalimantan Timur lainnya. Namun, Aji Qomara Hakim juga tidak memperhitungkan suaranya sebagai perempuan melainkan kemampuannya dalam berpendapat. Alhasil, tidak adanya kesepakatan yang demokratis dalam setiap diskusi pengurus melainkan pemakluman untuk mendapatkan hasil diskusi.

“...semuanya ingin berusaha hidup di dalam DKD bukan menghidupkan DKD. Itu yang saya kurang pas di situ, jadi kalo bicara tentang idealism yang sebenarnya, baiknya seperti itu mengumpulkan data-data dan pengarsipan sebagainya, ya itu gak berjalan tuh. Apakah itu perlu dana? Ya paling apa sih, internet? Namun kita bisa punya jaringan kan yang bisa kita lakukan bersama. Jadi itu yang kadang-kadang, di saya terutama sebagai perempuan sendiri, keputusan bisa mentok. “Enggak, seharusnya begini!” lalu dibungkus dan hilang. Saya dianggap terlalu keras. Tapi saya juga gak bicara karena saya perempuan, tapi membicarakan ini loh yang benarnya begini.” (Aji Qomara Hakim, Ketua Harian III, 13 Maret 2023).

Hal serupa terjadi pada Unies Sagena sebagai salah satu anggota di dalam komite sastra DKD Kalimantan Timur. Pembagian peran untuk melakukan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak pernah dibicarakan secara formal melainkan secara acak. Menurut Unies Sagena hal tersebut dapat dikatakan penting dikarenakan dirinya juga berada di dalam suatu organisasi bukan karena dirinya perempuan melainkan kemampuannya.

“Artinya kebudayaan yang ada aja terancam tidak dikenali lagi, itupun sudah sedikit, dan yang sedikit itu pun sudah terancam. Saya mengalami betul, misalnya kalau di kampus itu kita bikin *event* agak besar, kan selalu ditampilkan tarian-tarian, cuma saya amati kok tariannya itu melulu. Hudoq segala macam, karena saya yakin bukan itu saja. Saya bantu Pak Syafril garap buku Hasanan Kekayaan di Kaltim, saya ikut garap itu, akhirnya kan saya baca. Ada 4 jilid kita garap. Kaya sekali, tapi mana semuanya, kok jarang banget. Padahal kandungan filosofisnya tinggi, ada pesan-pesan dalam tarian dan segala macam yang harusnya itu bisa disampaikan, jadi tidak tersampaikan karena mungkin orang sudah tidak terlalu tau lagi memainkan, seperti pemeran-pemerannya sudah makin sepuh, tidak ada regenerasi. Saya alami itu, saya baca sampai ratusan, 4 jilid. Saya bergelut di bidang ini melihat gak begitu banyak variasinya. Apakah ini menandakan insan seni di sini mulai kurang kreatif atau hanya tau itu-itu saja, bagaimana generasi berikutnya, kalau generasi kita saja sudah terbatas pilihannya. Saya tanya juga ke mahasiswa kadang-kadang, mereka juga gatau. Bahkan penutur bahasa daerah, bahasa ibu juga sudah mulai luntur. Memperhatikan.” (Unies Sagena, Komite Sastra, 13 Maret 2023)

Meski demikian, Unies Sagena juga merasakan adanya keprihatinan karena dari masa ke masa dirinya selalu ditunjuk untuk menghadiri suatu kegiatan mewakili DKD Kalimantan Timur tanpa adanya pergantian peran ada generasi selanjutnya.

Posisi perempuan dalam dunia seni telah mengalami perkembangan dan perubahan seiring waktu. Historisnya, perempuan sering kali diabaikan, terpinggirkan, atau tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan rekan laki-laki dalam dunia seni. Namun, peran dan kontribusi perempuan dalam dunia seni telah semakin diakui dan dihargai seiring berjalannya waktu meski jumlahnya masih jauh dari peran laki-laki. Adapun aspek relevan yang terkait posisi perempuan dalam dunia seni meliputi akses ke pendidikan dan pelatihan. Di masa lalu, perempuan sering menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses ke pendidikan seni formal dan pelatihan profesional. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kesempatan untuk pendidikan seni yang setara semakin tersedia bagi perempuan. Sehingga, memungkinkan untuk perempuan mengembangkan keterampilan dan bakatnya dalam berbagai disiplin seni. Walaupun hal di atas belum terlihat pada aspek kesenian di Kalimantan Timur.

Representasi dalam karya seni perempuan sering kali menjadi subjek dalam karya seni, baik sebagai model, tokoh sejarah, atau simbol. Meski tidak sedikit juga perempuan yang menjadi objek dalam suatu karya, terutama bagian tubuhnya yang dianggap keindahan dan dibuat oleh seniman laki-laki. Meski begitu, perempuan masa kini sudah banyak menjadi pencipta dan narator dalam karyanya sendiri. Perempuan mencerminkan pengalaman, perspektif, dan identitasnya sebagai perempuan di dalam karya-karyanya. Hal tersebut menjadikan suatu wacana seni menjadi kaya dan luas. Tidak sedikit perempuan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan yang setara dengan seniman laki-laki dalam suatu perhelatan pameran. Meski telah banyak perempuan mencapai prestasi yang luar biasa dalam dunia seni. Pameran seni, koleksi, museum, dan penghargaan sering kali memiliki ketidakseimbangan gender.

Gerakan feminis dalam seni penting untuk memainkan perannya demi membongkar ketidakadilan dan ketimpangan gender. Gerakan ini perlu terus dirawat untuk mendorong perubahan sosial, kritis terhadap narasi yang dominan, dan mengadvokasi kesetaraan gender dalam semua aspek seni, termasuk

representasi, pengakuan, dan pengambilan keputusan. Penting untuk diakui bahwa setiap pengalaman perempuan dalam seni dapat bervariasi berdasarkan latar belakang, budaya, dan konteks sosial-politik. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, masih ada perjuangan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender penuh dalam dunia seni.

Terdapat prinsip-prinsip feminis dan konsep kepemimpinan dalam konteks seni yang dapat menjadikan seniman perempuan dan laki-laki setara. Hal ini berkaitan dengan pentingnya kesadaran gender dalam seni mencakup pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam seni, memberikan ruang dan peluang yang setara dalam kepemimpinan. Sehubungan dengan itu, penting untuk menghargai nilai kolaborasi dan pemberdayaan. Hal tersebut melibatkan kemitraan dan kerjasama yang sejajar, memperhatikan perspektif dan pengalaman yang beragam, serta memperkuat suara-suara yang sering kali terpinggirkan atau diabaikan dalam seni. Teori kepemimpinan feminis dalam seni mendorong kritik terhadap narasi yang dominan dan stereotip gender. Hal ini melibatkan refleksi kritis terhadap peran, representasi, dan citra perempuan dalam seni serta menggugah kesadaran akan kekuasaan dan struktur yang mempengaruhi produksi dan konsumsi seni.

Pendekatan lainnya tidak hanya fokus pada perubahan individual tetapi juga pada perubahan sosial dan sistemik. Dalam seni perlu untuk menciptakan perubahan yang lebih luas dalam praktik seni, institusi seni, masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai keadilan gender dan inklusivitas yang lebih baik. Hal tersebut juga perlu adanya dukungan dari perawatan dan etika dalam kepemimpinan seni. Hal itu melibatkan sikap empati, perhatian, dan kepedulian terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses seni, serta menjunjung tinggi nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan. Judith Butler, seorang filosofis feminis mengungkapkan teorinya dengan konsep performativitas gender dan identitas. Menurutnya, kepemimpinan feminis mengajukan pertanyaan tentang konstruksi sosial dari norma-norma gender dan menantang hierarki serta dominasi dalam konteks kepemimpinan (Butler, n.d.).

Butler juga mengungkapkan bahwa performativitas gender dan identitas merupakan konsep sentral dalam sebuah pemikiran. Pendapatnya bahwa gender dan identitas bukan sesuatu yang melekat secara alami pada individu, melainkan

dipahami sebagai hasil dari tindakan dan performativitas sosial. Hal ini memiliki arti bahwa gender tidak statis atau baku, tetapi lebih merupakan suatu konstruksi sosial yang terus menerus diperbincangkan dan direproduksi dalam praktik sehari-hari. Kembali lagi Butler mengungkapkan bahwa suatu performativitas yang dilakukan berulang kali dalam interaksi sosial, seperti bahasa, gerakan, tubuh, dan penampilan. Oleh karena itu, gender bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu, tetapi lebih merupakan suatu tindakan atau pertunjukan yang dibangun dalam interaksi dengan orang lain.

Butler juga menekankan bahwa identitas adalah proses yang terus berubah dan terbentuk melalui performativitas gender. Butler menantang pandangan tradisional yang menganggap identitas sebagai sesuatu yang tetap, alami, atau esensial. Menurut Butler, identitas tidak stabil, melainkan dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang membatasi dan membentuk cara individu memahami dan mengekspresikan diri. Dalam pandangan Butler, performativitas gender dan identitas berfungsi untuk menjaga serta mempertahankan sistem gender yang ada. Butler mengkritik struktur-struktur kekuasaan yang memaksakan norma-norma gender yang ketat dan menekan variasi serta pluralitas identitas. Butler mendukung upaya untuk melembutkan atau merusak batasan-batasan gender yang kaku serta menghargai keberagaman serta kebebasan individu dalam mengekspresikan identitas setiap individu.

C. Konstruksi Gender dan Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur sebagai Representasi Negara

Jika dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan DKD Kalimantan Timur, tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan isu perempuan. Hal ini menandakan pula tidak adanya kesadaran gender pada perspektif kelembagaan. Padahal, Indonesia memiliki 3 (hari) hari kegiatan yang berhubungan dengan perayaan perempuan seperti halnya Hari Kartini pada tanggal 21 April, Hari Kesetaraan Gender Nasional yang jatuh pada 5 April, dan Hari Perempuan yang jatuh pada tanggal 22 Desember, atau yang dikenal dengan Hari Ibu. Hal tersebut memberikan efek dan berdampak pada kesenian di Kalimantan Timur yang pada akhirnya tidak memiliki kesadaran gender, terutama terhadap peran perempuan. Adapun efek dan dampak yang dapat timbul di masyarakat seperti tidak adanya pemberdayaan

perempuan dengan memberi ruang untuk berpartisipasi aktif dan setara dalam dunia seni, tidak adanya promosi tentang kesetaraan gender dalam masyarakat, kuatnya stereotip gender yang dapat menciptakan ruang aman bagi individu yang berbeda gendernya, dan tidak terbentuknya komunitas yang inklusif dalam kesenian di Kalimantan Timur.

Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kalimantan Timur sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan di wilayah Kalimantan Timur memiliki peran penting sebagai representasi negara. Peran tersebut tidak lepas dari pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya daerah. DKD Kalimantan Timur bekerja untuk menjaga dan merawat kesenian tradisional serta kekayaan budaya lokal agar tetap hidup dan tidak terlupakan. Dalam hal ini, DKD Kalimantan Timur juga mewakili negara dalam menjaga dan melindungi warisan budaya yang merupakan aset nasional. Selain itu, DKD Kalimantan Timur bertanggung jawab dalam mengembangkan seni dan budaya di daerah. Pentingnya peran DKD Kalimantan Timur dalam mendukung dan memfasilitasi berbagai kegiatan seni dan budaya seperti festival, pertunjukan seni, *workshop*, dan pendidikan seni. Sehubungan dengan itu, DKD Kalimantan Timur berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam mendorong dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah.

DKD Kalimantan Timur yang merupakan representasi negara di tingkat nasional yang merupakan penghubung antara pemerintah daerah dengan komunitas seni. Hal ini meliputi komunikasi antara pemerintah dan pelaku seni serta organisasi seni di daerah. Selain itu juga, DKD Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan program-program kesenian dan budaya serta penyaluran dana untuk pengembangan seni dan budaya di daerah. Dalam keseluruhan, DKD Kalimantan Timur sebagai representasi negara dalam konteks kesenian dan budaya memiliki peran penting dalam pemeliharaan, pengembangan, dan pengawalan seni dan budaya di daerah kota maupun kabupaten, serta menjembatani hubungan antara pemerintah dan komunitas seni.

Eksistensi Dewan Kesenian di level kota dan provinsi Kalimantan Timur yang mewadahi masyarakat kesenian hingga sekarang, merupakan kontribusi nyata dari masyarakat seni itu sendiri. Hal tersebut juga tidak terlepas dari atensi negara

pada kesenian dan kebudayaan di level provinsi. Adapun landasan untuk pendukung adanya DKD Kaltim, selain Imendagri ialah dibentuknya Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan yang menjadi jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 2017 tersebut merupakan peraturan pertama tentang kebudayaan nasional yang disahkan oleh Pemerintah sebagai acuan legal-formal dalam mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Menurut informan, istilah “pemajuan kebudayaan” itu sendiri tidak muncul tiba-tiba. Istilah tersebut sudah digunakan para pendiri bangsa pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 32, yaitu “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Saat terjadinya perubahan UUD 1945 pada awal masa reformasi melalui proses amandemen, pemajuan kebudayaan tetap menjadi prioritas bahkan makin ditegaskan. Pasal 32 UUD 1945 dikembangkan menjadi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Dengan begitu, kehadiran UU Pemajuan Kebudayaan, cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat berkepribadian secara budaya, berdikari secara ekonomi, serta berdaulat secara politik, kini siap diwujudkan. Sehubungan dengan itu, UU Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia. Terdapat lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa serta adat istiadatnya yang membentuk masyarakat Indonesia. Keragaman tersebut yang mendasari kesenian dan kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan perspektif yang adil dalam melihat budaya yang ada di Indonesia. Setiap unsur kesenian dan kebudayaan yang paling netral, ramah, dan terbuka yakni “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat itu sendiri.” Sehingga, kesenian dan kebudayaan nasional diartikan sebagai “keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.”

Jika ditelaah lebih lanjut, kata “proses” dan “hasil” berada di dalam satu kalimat yang artinya UU Pemajuan Kebudayaan tidak hanya membahas wujud-wujud yang tampak dari kebudayaan, seperti halnya alat maupun bangunan, melainkan turut memperhitungkan proses hidup masyarakat yang melatari lahirnya

setiap produk dan praktik kesenian serta kebudayaan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masyarakat kesenian saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, kelompoknya, juga lingkungannya. Ketika kebutuhan itu berubah, maka berubah pula corak hubungannya, begitu juga dengan produk dan praktik kebudayaannya. Sehingga kebudayaan tidak pernah berhenti menghasilkan sesuatu, atau selalu berada di dalam proses.

Di dalam UU Pemajuan Kebudayaan juga mengatakan bahwa masyarakat adalah pemilik dan penggerak kebudayaan. Perkembangan kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. UU Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat kesenian sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan, dari tingkat komunitas sampai industri, adalah pihak yang paling akrab dan paham tentang kebutuhan juga tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan. Sebagai dasar bagi perancangan arah pemajuan kebudayaan nasional, UU Pemajuan Kebudayaan mensyaratkan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan berupa dokumen yang berisi kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi di daerah masing-masing serta tawaran solusinya. Pokok Pikiran Kebudayaan itu disusun oleh masyarakat dan dianggap sah oleh negara. Pokok Pikiran Kebudayaan pertama-tama disusun pada tingkat kabupaten/kota, lalu diolah pada tingkat provinsi. Hasil dari setiap provinsi kemudian dihimpun pada tingkat nasional sebagai bahan untuk merumuskan Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat.¹¹

Dalam semua proses itu, negara memiliki peran sebagai pendamping masyarakat, tidak terkecuali DKD Kalimantan Timur. Negara harus hadir sebagai regulator yang mewadahi partisipasi dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan rancangan-rancangan tersebut, negara bersama masyarakat kesenian mengupayakan pemajuan kebudayaan dari tingkat lokal hingga nasional. Namun, terdapat hal yang luput dari regulasi tersebut dalam aspek gender baik yang telah diputuskan oleh Pemerintah Pusat maupun rencana regulasi yang sedang dipersiapkan oleh DKD Kalimantan Timur di Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan. Di dalam UU Pemajuan Kebudayaan memberikan pengakuan

¹¹ <https://pemajuankebudayaan.id/undang-undang/>

terhadap peran gender dalam kebudayaan di Indonesia. Peran gender diakui sebagai faktor penting dalam pemajuan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan di negara Indonesia. UU Pemajuan Kebudayaan menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam konteks kebudayaan. Hal ini tercermin dalam penekanan pada perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak kesetaraan bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

UU Pemajuan Kebudayaan menekankan perlindungan terhadap kekayaan budaya perempuan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap pengetahuan, praktik, dan ekspresi budaya yang terkait dengan peran perempuan dalam berkesenian dan kebudayaan. Hal lainnya, UU Pemajuan Kebudayaan mendorong pemberdayaan perempuan termasuk dukungan untuk partisipasi aktif perempuan dalam pembuatan kebijakan kebudayaan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan dan pengembangan kegiatan seni dan budaya. Sehubungan dengan itu, UU Pemajuan Kebudayaan menekankan pentingnya penyajian kebudayaan yang menghormati nilai dan norma gender yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan stereotip gender dalam penyajian budaya di media massa, pertunjukan seni, dan aktivitas kebudayaan lainnya. Adapun isi lainnya dari UU Pemajuan Kebudayaan ialah mendorong kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai kesetaraan gender dalam pemajuan kebudayaan.

Melalui berbagai ketentuan dan penekanan tersebut, UU Pemajuan Kebudayaan memberikan pengakuan terhadap peran gender dalam kesenian dan kebudayaan serta mengarahkan upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia agar lebih inklusif dan menghormati kesetaraan gender. Hal-hal tersebut merupakan aspek penting dalam setiap regulasi yang dikembangkan pada lembaga seni daerah, meski adanya otonomi daerah yang berlaku. Meski demikian, payung hukum DKD Kalimantan Timur kepada Pemerintah Daerah dan Gubernur tidak memasukan aspek gender di dalamnya. Artinya, hal tersebut telah menghilangkan peran gender dalam kesenian yang telah menjadi kebiasaan masyarakat seni di Kalimantan Timur sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara, maupun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Aspek gender dalam regulasi seni merupakan pengakuan terhadap seniman perempuan dalam industri seni dan penghapusan ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan dan representasi di institusi seni. Seperti halnya keterwakilan seniman perempuan dalam pameran seni, koleksi pameran, dan penghargaan harus dipertimbangkan dalam regulasi seni. Pemerintah dan institusi seni, dalam hal ini adalah DKD Kalimantan Timur harus berkomitmen untuk menciptakan ruang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama untuk seniman perempuan. Adapun juga kepemimpinan perempuan dalam lembaga seni harus mencakup keberagaman gender dan melibatkan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Perempuan harus didorong untuk mengambil peran kepemimpinan dalam institusi seni, seperti menjadi direktur museum, curator, atau pengusaha seni.

Di dalam hal kuratorial, kurator seni harus memperhitungkan isu-isu gender dalam pameran seni dan mempertimbangkan kontribusi seniman perempuan. Kurator juga harus memperjuangkan inklusivitas dan keadilan dalam kuratorial seni serta menciptakan ruang bagi berbagai suara dan identitas. Begitu juga mengenai penghargaan dan pengakuan terhadap seniman perempuan harus diberikan dengan adil dan merata. Pemerintah dan DKD Kalimantan Timur harus mempertimbangkan keterwakilan gender dalam memberikan penghargaan dan pengakuan, dan memberikan dukungan finansial kepada seniman perempuan. Regulasi seni harus mempertimbangkan aspek gender dalam upaya menciptakan industri seni yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan komitmen dari pemerintah dan institusi seni untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam industri seni.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Judith Butler dalam esai yang berjudul *Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory* bahwa regulasi seni harus mempertimbangkan bagaimana representasi gender dalam karya seni dapat memperkuat atau mengganggu konstruksi sosial gender. Butler menekankan perlunya mempertanyakan stereotip gender yang ada di dalam seni dan memperluas bagi berbagai identitas gender. Artinya regulasi seni sadar gender akan mempengaruhi pada representasi yang inklusif. Hal tersebut mencerminkan keberagaman gender dalam representasi karya seni. Ini berarti memperluas kanon seni untuk mencakup berbagai perspektif dan pengalaman gender. Jika melibatkan seniman perempuan dan kelompok gender

lainnya, regulasi seni dapat menciptakan ruang yang lebih inklusif dan merefleksikan keragaman masyarakat.

Hal di atas juga berhubungan dengan perlawanan atas stereotip gender. Regulasi yang sadar gender dapat memerangi stereotip gender dan peran gender yang kaku dalam seni. Ini membuka jalan bagi penjelajahan dan redefinisi konstruksi sosial tentang gender dalam karya seni. Hal ini memungkinkan seniman untuk mengungkapkan identitas dan pengalamannya yang tidak terikat oleh ekspektasi gender sempit. Hal tersebut juga berkaitan dengan pengaruh terhadap masyarakat untuk membentuk pandangan tentang gender dan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Regulasi seni yang sadar gender dapat membantu membangun narasi yang lebih inklusif, merangsang pemikiran kritis, dan mempengaruhi perubahan sosial yang lebih luas dalam persepsi dan kesadaran gender. Terlebih lagi, adanya potensi kreatif dan inovasi dalam industri seni. Dengan mendorong inklusivitas dan keberagaman, regulasi seni yang sadar gender dapat memperkaya ekspresi artistik, menghadirkan ide-ide baru, dan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih dinamis.

Regulasi seni yang sadar gender bukan hanya tentang memperhatikan kesetaraan gender, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan perubahan yang positif dalam budaya, penghargaan, dan representasi seni. Dengan memperhatikan aspek gender dalam regulasi seni, maka dapat mencapai industri seni lebih inklusif. Namun, alih-alih memasukan aspek tentang pengarusutamaan gender pada kesenian dan kebudayaan di Kalimantan Timur, DKD Kalimantan Timur berikhtiar untuk mengembalikan peran lembaga pada ranah yang ideal yaitu menjadi mitra pemerintah melalui SK Gubernur dengan alas hukum Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah. Hal tersebut akan berhubungan dengan politik anggaran yang akan didapatkan oleh DKD Kalimantan Timur agar dapat membuat aktivitas-aktivitas seni seperti yang akan direncanakan. Meskipun ikhtiar tersebut merupakan sesuatu hal yang juga berarti namun luput dari nilai-nilai yang telah dibangun oleh masyarakat adat sejak zaman kerajaan, yaitu pentingnya untuk memasukan peran gender dalam regulasi.

D. Gagalnya Memahami Makna Gender dalam Berkesenian di Kalimantan Timur

Pemahaman gender dalam berkesenian di Kalimantan Timur tercermin dalam kehidupan budaya dan seni lokal, hingga masuknya pengaruh modernisasi. Seperti adanya peran tradisional tari khas laki-laki dan perempuan yang memperlihatkan peran dan gerakan yang berbeda sesuai dengan gender masing-masing. Adapula kesenian ritual adat Kalimantan Timur untuk upacara keagamaan dan acara adat. Dalam konteks ini, pemahaman gender dalam upacara tersebut seperti pemberian peran khusus bagi laki-laki yang memainkan musik-musik tradisional dan perempuan memiliki peran sebagai penari. Namun, pengaruh modernisasi dan perubahan sosial juga berdampak pada pemahaman gender dalam berkesenian di Kalimantan Timur. Beberapa seniman mencoba untuk menggali ulang pemahaman gender tradisional atau mengeksplorasi dimensi baru tentang gender dalam karya seni dan pembagian peran. Seperti halnya yang dilakukan oleh DKD Kalimantan Timur dalam menempatkan perempuan ketika membuat alas hukum kelembagaan. Hal tersebut berdampak pada nilai-nilai kehidupan seni pada masa Kerajaan Kutai Kertanegara yang memberikan ruang ekspresi seni terhadap perempuan namun tidak terlihat saat munculnya DKD Kalimantan Timur.

Upaya membuat alas hukum untuk DKD Kalimantan Timur menjadi penting untuk dilakukan agar keberadaan lembaga tersebut tidak hanya sebagai tempat untuk mencari nafkah bagi masyarakat kesenian. Adanya alas hukum dari Gubernur Kalimantan Timur akan memudahkan pengurus internal dalam mengatur strukturisasi organisasi di dalam Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur. Meski demikian, alas hukum yang dibentuk oleh DKD Kalimantan Timur tidak berdampak pada pembagian peran setara antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut tidak menjadi fokus utama di dalam lembar catatan alas hukum yang dibuat. Hal tersebut dikarenakan, menurut Drs. Hamdani sebagai ketua harian DKD Kalimantan Timur bahwa dalam proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara demokratis. Namun, demokratis yang dimaksud tidak memperhitungkan suara perempuan, dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Aji Qomara Hakim sebagai Ketua Harian III.

Di samping pembagian peran yang tidak setara di DKD Kalimantan Timur masih muncul, terdapat juga sentimen gender yang dianggap tidak relevan di dalam

dunia kesenian, melainkan kreativitasnya, seperti yang dikatakan oleh Syafril Teha Noer.

“Kebetulan kita gak melihat hal *equal* berdasarkan sentimen gender, kami menganggap laki-laki dan perempuan di dunia kesenian itu rada-rada kurang relevan, yang relevan itu kreativitasnya. Begitu mengukurnya. Misalnya ada laki-laki tapi menghasilkan karya tari seperti perempuan, seperti Didik Ninik Towo? Itu secara gender mau kita kelompokkan ke mana? Gak bisa. Tapi ada juga seperti di dunia film seperti Reza Rahardian, kita mau mengelompokkan seperti apa? Karena aku dengar dia seperti itu. Jadi, kita gak melihat hal *equal* di dalam aktivitas DKD berdasarkan sentimen gender. Bisa jadi karena kamu mengalaskan berbasis gender, kamu bisa jadi menghina gender, atau menafikan gender.” (Syafril Teha Noer, Ketua Umum DKD Kalimantan Timur, 13 Maret 2023)

Artinya, teori yang dicetuskan oleh Simone De Beauvoir masih relevan dalam situasi DKD Kalimantan Timur bahwa perempuan masih berada di dalam peran reproduktif atau tidak menjadi subjek seperti laki-laki dalam berkarya seni. Hal ini juga terlihat dari bagaimana pemberian penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur yang berfokus pada seniman laki-laki saja.

Padahal jika DKD Kalimantan Timur memperhitungkan peran perempuan dalam manajemen seni, artinya lembaga tersebut akan meneruskan nilai-nilai kesetaraan yang telah dibangun sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara. Peran perempuan dalam manajemen seni sangat penting dan beragam di masa kini. Perempuan masa kini telah banyak berkontribusi secara signifikan dalam mengelola, mempromosikan, dan mengembangkan industri seni di berbagai bidang, seperti musik, teater, tari, seni rupa, dan film. Adapula perempuan yang sering kali menjadi manajer seniman dengan tugas mengelola karir dan kegiatan seorang seniman, seperti halnya mengatur jadwal pertunjukan, negosiasi kontrak, manajemen finansial, dan strategi pemasaran. Kurator, perempuan juga sering kali menjadi kurator di galeri seni dan museum. Tugas dan tanggung jawab untuk memilih karya seni yang akan dipamerkan, mengatur tata letak pameran, serta mengembangkan tema dan narasi yang kuat.

Adapula perempuan masa kini menjadi produser dalam industri musik dan film. Peran perempuan memproduksi artistik dan kreatif, mengatur jadwal

produksi, mengelola anggaran, serta berkoordinasi dengan tim kreatif, dan teknis pun dapat dilakukan. Sebagai produser, perempuan memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi arah dan isi karya seni yang dihasilkan. Selain itu juga perempuan dapat menjadi pengusaha seni. Banyak perempuan yang mendirikan perusahaan seni, termasuk rumah produksi, label rekaman, atau galeri seni. Perempuan memainkan peran kunci dalam mengembangkan bisnis seni, menciptakan peluang bagi seniman, dan mempromosikan keberagaman dalam industri seni. Ada juga perempuan yang menjadi pendidik dan peneliti seni. Keterlibatan perempuan dalam pendidikan dan penelitian di bidang seni seperti dosen dan kritikus seni sudah banyak dilakukan saat ini. Pendidikan dan penelitian seni masa kini membantu memperkaya pemahaman generasi mendatang tentang seni dan memberikan kontribusi dalam memajukan industri seni.

Di dalam esai Linda Nochlin (1971) berjudul "*Why Have There Been No Great Women Artists?*" yang dituliskan oleh Caldwell (2018) mengatakan bahwa landasan dasar untuk pemahaman publik tentang bagaimana hambatan sosial, budaya, dan politik yang sistemik menghalangi perempuan untuk mengambil bagian dalam dunia seni dengan berbagai cara.¹² Nochlin memperjelas bahwa untuk memahami dunia seni bukan dengan gaya artistik atau estetika laki-laki yang diistimewakan di atas gaya feminin, tetapi perempuan yang telah dijauhkan dari pendidikan seni, dan karenanya jauh dari produksi seni dan pasar seni itu sendiri. Padahal perempuan memiliki wawasan unik yang dapat membawa perspektif baru dalam kuratorial, penelitian, dan manajemen seni. Nochlin menyoroti perlunya mendorong kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam institusi seni.

Terlebih lagi, melihat eksistensi keberadaan DKD Kalimantan Timur dari masa ke masa tidak memperlihatkan adanya pemahaman gender dengan memberikan posisi perempuan dan laki-laki sebagai pemimpin secara setara. Hal ini sejalan dengan pemahaman Butler bahwa konstruksi sosial perlu adanya keleluasaan dalam memandang gender. Hal ini berkaitan dengan pandangan tradisional yang menganggap gender sebagai dua kategori yang terpisah dan tetap, yaitu perempuan dan laki-laki. Pemahaman biner seperti demikian merupakan hal

¹² <https://daily.jstor.org/linda-nochlin-on-why-have-there-been-no-great-women-artists/>

yang membatasi kebebasan individu dalam mengekspresikan identitas gender dari masing-masing individu. Berdasarkan pemahaman Butler, maka dapat dikatakan bahwa gender merupakan spektrum yang luas, yang melibatkan berbagai identitas dan ekspresi gender yang tidak dapat dikurung dalam pembagian yang sederhana. Sehingga, jika perempuan diberikan ruang menjadi pemimpin dalam suatu kelembagaan seni, perempuan itu sendiri akan membicarakan tentang kerentanan perempuan atas dirinya. Lebih lanjut, perempuan akan melibatkan masyarakat non seniman, seperti ibu rumah tangga dengan tujuan untuk membangun apresiasi seni yang berkelanjutan di dalam masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Lampung.

Cerita lain dari Dewan Kesenian Jakarta pada masa kepemimpinan Ratna Sarumpaet. Terdapat perspektif gender yang secara sadar disorot melalui program yang khusus mengakomodasi seniman perempuan, seperti penyelenggaraan *Women Playwrights International Conference 2005* guna membangun jejaring dan komunikasi para perempuan penulis drama dan pegiat teater. Hal serupa telah diupayakan oleh Haji Qomara Hakim sebagai Ketua III yang merupakan satu-satunya perempuan dalam DKD Kalimantan Timur. Di dalam program yang diusung mengupayakan memberikan pelatihan seni musik kepada masyarakat seniman yang ada di Kalimantan Timur, meski tidak berfokus pada pembagian gendernya. Peran perempuan di DKL, DKJ, dan DKD Kalimantan Timur merupakan penyimpangan di tengah praktik yang berlangsung nyaris di seluruh Dewan Kesenian di Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam posisi pemimpin sangat rentan atas penyangkalan karena mentalitas dan budaya patriarki yang masing kental. Keberadaan perspektif gender pada Dewan Kesenian daerah masing bergantung pada prioritas dan tata kelola lembaga masing-masing. Sehingga untuk meningkatkan jumlah dan kualitas perempuan ada pada di posisi pemimpin di Dewan Kesenian, maka seniman perempuan perlu membangun kesadaran akan signifikansi posisinya serta mendesak adanya program yang lebih berpihak pada seniman perempuan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Luputnya Dewan Kesenian Daerah Kaltim dalam Melegitimasi Peran Perempuan dalam Tata Kelola Seni

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, telah diperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Representasi Perempuan dalam Tata Kelola Kepemimpinan Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam ruang ekspresi seni yang setara sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara. Ruang ekspresi seni tersebut dianulir untuk perempuan sebagai penjaga tradisi dan warisan kebudayaan. Terlebih lagi, terdapat ruang ekspresi seni yang non biner di Kalimantan Timur. Meski demikian, dalam kehidupan sehari-hari ruang perempuan masih ditempatkan pada posisi subordinasi dari pada laki-laki.
2. Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur memiliki potensi untuk melegitimasi perempuan dalam tata kelola seni, namun terdapat beberapa potensi kegagalan atau tantangan yang dapat menghambat upaya tersebut. Kegagalan yang terjadi meliputi kurangnya representasi dan partisipasi perempuan dalam tata kelola seni di DKD Kalimantan Timur. Terbatasnya akses dan kesempatan yang adil bagi seniman perempuan untuk posisi penting seperti pengambil keputusan di dalam DKD Kalimantan Timur menjadi kendala dalam tata kelola seni yang inklusif. Sehubungan dengan itu, kegagalan DKD Kalimantan Timur dalam melegitimasi perempuan dalam tata kelola seni terkait dengan tidak adanya kebijakan yang secara khusus mengadvokasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam seni. Masih adanya stereotip gender dan diskriminasi dalam dunia seni yang terjadi di DKD Kalimantan Timur dalam melegitimasi perempuan. Hal tersebut tampak pada pengakuan informan bahwa gender tidak relevan di dalam dunia kesenian. Sehingga terjadi kurangnya penghargaan dan pengakuan terhadap kontribusi seniman perempuan dalam seni.
3. Pemahaman gender dalam berkesenian di Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan seperti stereotip gender yang mempengaruhi praktik kesenian. Peran dan ekspresi perempuan dalam seni dibatasi dalam stereotip

bahwa perempuan hanya dapat melakukan peran reproduktif sehingga membatasi kreativitas dan partisipasi perempuan itu sendiri.

4. Belum adanya dukungan institusional di dalam DKD Kalimantan Timur untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam berkesenian. DKD Kalimantan Timur dapat memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan seniman perempuan serta mendorong representasi dan partisipasi yang adil.

B. Hal-hal yang dapat Dijadikan Pertimbangan untuk Penelitian Selanjutnya

Berikut merupakan tambahan referensi yang dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya:

1. Analisis efektivitas DKD Kalimantan Timur dalam mencapai tujuan dan tugasnya untuk pemajuan seni yang sadar gender. Fokus penelitian dapat meliputi analisis kinerja, keberhasilan program dan kegiatan yang melibatkan perempuan, serta dampak yang dihasilkan oleh DKD Kalimantan Timur dalam mendukung perkembangan seni di wilayah tersebut.
2. Penelitian dapat mengkaji peran DKD Kalimantan Timur dalam mempromosikan kesenian yang memberikan ruang ekspresi seni terhadap perempuan dan tidak terbatas pada ruang reproduktif.
3. Fokus penelitian dapat meliputi analisis representasi perempuan dalam struktur kepengurusan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta dukungan yang diberikan kepada seniman perempuan di DKD Kalimantan Timur.
4. Penelitian dapat menguji dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan yang dilakukan DKD Kalimantan Timur. Ini melibatkan pengukuran efek dari program dan kegiatan seni yang diinisiasi oleh DKD Kalimantan Timur terhadap masyarakat dan sektor seni di Kalimantan Timur.
5. Penelitian dapat menyelidiki tingkat keterlibatan masyarakat dalam DKD Kalimantan Timur. Fokus penelitian dapat meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam program seni dan kegiatan DKD Kalimantan Timur serta

tingkat kepuasan masyarakat terhadap peran DKD Kalimantan Timur dalam pemajuan seni di Kalimantan Timur.

Penelitian-penelitian selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja, peran, dan dampak DKD Kalimantan Timur dalam pemajuan seni yang sadar gender. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan upaya peningkatan kinerja DKD Kalimantan Timur serta pemberdayaan seniman dan masyarakat dalam bidang seni di wilayah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Antrobus, Peggy. 1999. In *Conversation with Charlotte Bunch and Marianne DeKoven*, "Talking Leadership: Conversations with Powerful Women", New Brunswick, Rutgers University Press. Diakses pada 11 Januari 2023.
- Ardiansa, Dirga. 2016. Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. Departemen Ilmu Politik. FISIP UI. Diakses di <https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/menghadirkan-kepentingan-perempuan-dalam-representasi-politik-di-indonesia.html> pada 17 Mei 2022.
- Butler, J. (1999). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*.
- De Beauvoir, S., Parshley, H. M., Cape, J., Bedford, T., & London, S. (1953). *Second Sex*.
- Gumay, H., Handika, R., Lazarus, E., & Ninditya, R. (2020). *Artistic Freedom in Indonesia 2010-2020: A Literature Study*. 1–58.
- Luh, N., Astari, W., & Sugiarta, M. (2020). *Nomor 2 Tahun 2020 Vidya Wertta*. 3. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>
- Putraningsih, T. (2006). PERTUNJUKAN TARI: SEBUAH KAJIAN PERSPEKTIF GENDER. In *Titik Putraningsih) Imaji* (Vol. 4, Issue 1).
- Sofyan, A. (2012). *Chatarsis 1 (1) (2012) Chatarsis: Journal of Arts Education KONSEP PEMBELAJARAN SENI BUDAYA BERPERSPEKTIF GENDER (STUDI KASUS BIDANG STUDI SENI TARI PADA SMP DI KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH)*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/chatarsis>
- Veal, A. J., & Burton, C. (2014). *Research Methods for Arts and Event Management*. www.pearson.com/uk
- Winarno, I. A. (2007). Persoalan Kesetaraan Gender dalam Karya Seni Rupa Kontemporer Indonesia. In *ITB J. Vis. Art* (Vol. 1, Issue 2).
- Barton, Tracy. 2006. "Feminist Leadership Building Nurturing Academic Communities", in *Advancing Women's Leadership Online Journal*, Vol 21. Diakses pada 11 Januari 2023.
- Byrnes, William. 2014. *Management and the Arts*. New York. Routledge.
- Chong, Derrick. 2010. *Arts Management*. New York. Routledge.
- Coon, Chelsea. 2019. *Still Happening: Gender Inequality in Art*.

<https://theartling.com/en/artzine/gender-inequality-art/>. therartling.com.

Diakses pada 12 Maret 2023.

- Cresswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry & research koleh design: Choosing among five approaches* (3rd ed.) SAGE Publications, Inc.
- Glow, Hilary. Minahan, Stella, dan Gahan, Peter. 2015. *A Creative Twist: Management Theory, Creativity and the Arts*. Cambridge University Press.
- Idrus, Nurul Ilmi. 2006. Antropologi Feminis: Etnografi, Relasi Gender dan Relativisme Budaya di Indonesia. *Antropologi Indonesia* Vol. 30, No. 3, 2006.
- Ingraham. W. P. 2004. *The Art of Governance Analyzing Management and Administration*. Georgetown University Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2017. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, dapat diakses di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>, diakses pada 10 Desember 2021.
- Kleppe, Bård. 2017. *Managing Autonomy: Analyzing Arts Management and Artistic Autonomy through the Theory of Justification*. Routledge. Taylor & Francis Group.
- Koalisi Seni. 2021. Advokasi Keadilan Gender dalam Seni. Jakarta. koalisiseni.or.id
- Louise, Dany. 2016. *Women in the Visual Arts: "Leadership is not a gender-neutral space"*. <https://www.a-n.co.uk/news/women-in-the-visual-arts-leadership-is-not-a-gender-neutral-space/>. a-n.co.uk. Diakses pada 12 Maret 2023.
- Paramaditha, Intan. 2019. Bongkar: Siasat Feminis dalam Seni dan Budaya di Indonesia. Magdalene.co. <https://intanparamaditha.com/news/bongkar-siasat-feminis-dalam-seni-budaya-di-indonesia>. Diakses pada 10 Januari 2023.
- Putra, Nusa. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Rasyidin, Rasyidin dan Fidhia, Aruni. 2018. *Gender dan Kontestasi Politik dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Lhokseumawe. Sefa Bumi Persada.

- Safira, Rahma. S, 2021. Jejak Pemimpin Perempuan dalam Dewan Kesenian. <https://www.pojokseni.com/2021/04/jejak-pemimpin-perempuan-dalamdewan.html>.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Susanto, Nanang Hasan. 2015. Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. Pekalongan. STAIN. Muwazah, Volume 7, Nomor 2. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index/php/chatarsis>
- Tonks, Ann. 2020. *The A to Z of Arts Management*. A Focal Press Book.
- Udasmoro, Wening. 2018. Dari Doing ke Undoing Gender: Teori dan Praktik dalam Kajian Feminisme. Gadjah Mada University Press.
- Varbanova, Lidia. 2012. *Strategic Management in the Arts*. New York. Routledge.
- Wijayanto, Dian. 2016. Pengantar Manajemen. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta. Center for Academic Publishing Service.
- Wei. Wei. 2015. *Street, Behavior, Art: Advocating Gender Rights and the Innovation of a Social Movement Repertoire*. School of Social Development, East China Normal University, Shanghai, China.
- Yukl, G. A. (2010). *Leadership in organizations* (7th ed.). Prentice Hall.
- Zunaeva, Lailatul dan Cika, Hutri. 2018. Membingkai Kesetaraan Gender Melalui Karya Seni. Jakarta. Balairung Press.